WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR
PRODUK HUKUM

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yag selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra- PD merupakan:

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

2. Pedoman penyusunan Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	:	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	:	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	:	Penutup

(2) Rincian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
c. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
d. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025-2029;
e. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025-2029;
f. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
g. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
h. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025-2029;
i. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025-2029;
j. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025-2029;

k. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025-2029;

l. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025-2029;

m. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025-2029;

n. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029;

o. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025-2029;

p. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025-2029;

q. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025-2029;

r. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029;

s. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029;

t. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029;

u. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;

v. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025-2029;

w. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;

x. Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;

y. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025-2029;

z. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;

aa. Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025-2029;

bb. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025-2029;

cc. Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025-2029; dan

dd. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 September 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

28. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sesuai amanat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dimana perencanaan pembangunan terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan ke dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari perangkat daerah, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan perangkat daerah lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh perangkat daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sananwetan merupakan petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran strategis selama 5 (lima) tahun kedepan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya. Serta guna mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2025- 2029, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Sananwetan, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kota Blitar. Renstra Kecamatan Sananwetan memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan isu dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029. Renstra juga dibuat dalam rangka tindaklanjut evaluasi SAKIP tahun 2024 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan.

Berdasar hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sesuai Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 yaitu sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Renstra Kecamatan Sananwetan Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam memberikan pelayanan kewilayahan untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sananwetan setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan Sananwetan pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Sananwetan ini sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tahapan / Proses Pembuatan Renstra

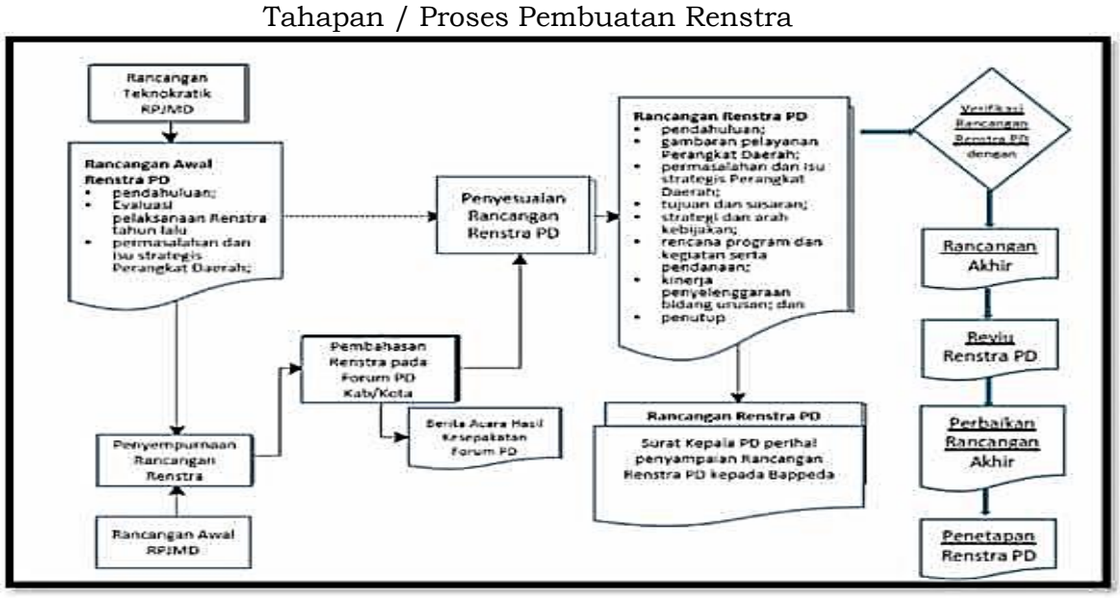

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

1. Persiapan penyusunan, meliputi:
   a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
   b. Orientasi mengenai Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
   a. Pendahuluan;
   b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
   c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
   d. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
   e. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
   f. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
   g. Indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Rancangan Renstra yang telah disusun dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan stakeholder Perangkat Daerah yang bersangkutan.
5. Perumusan Rancangan Akhir; hasil rumusan Rancangan Renstra yang dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kemudian disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.
6. Penetapan. Kecamatan Sananwetan mengemban misi ke lima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi melalui sasaran strategis untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik maka tujuan strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan dan peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Sananwetan didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 202 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); dan
30. Peraturan Daerah Kota Blitar tentang RPJMD

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sananwetan adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah :

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Kecamatan Sananwetan selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Kecamatan Sananwetan selama 5 (lima) tahun mendatang;
3. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
4. Menetapkan rencana program dan kegiatan Kecamatan Sananwetan yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang;
5. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan selama 5 (lima) tahun mendatang;
6. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Sananwetan Tahun 2025-2029 diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Mitra Kecamatan Sananwetan dalam Pemberian Pelayanan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis
2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sananwetan merupakan kecamatan yang terletak di bagian utara, timur dan selatan Kota Blitar dengan luas wilayah 12,15 km^{2}2. Kecamatan Sananwetan terdiri dari 7 Kelurahan antara lain Kelurahan Gedog dengan luas 2,95 km^2, Kelurahan Plosokerep dengan luas 1,164 km^2, Kelurahan Klampok dengan luas 1,557 km^2, Kelurahan Sananwetan dengan luas 2,154 km^2, Kelurahan Rembang dengan luas 0,869 km^2, Kelurahan Karangtengah dengan luas 1,899 km^2, Kelurahan Bendogerit dengan luas 2,055 km^2.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan maka bagan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SANANWETAN
(Perwali Nomor 77 Tahun 2016)

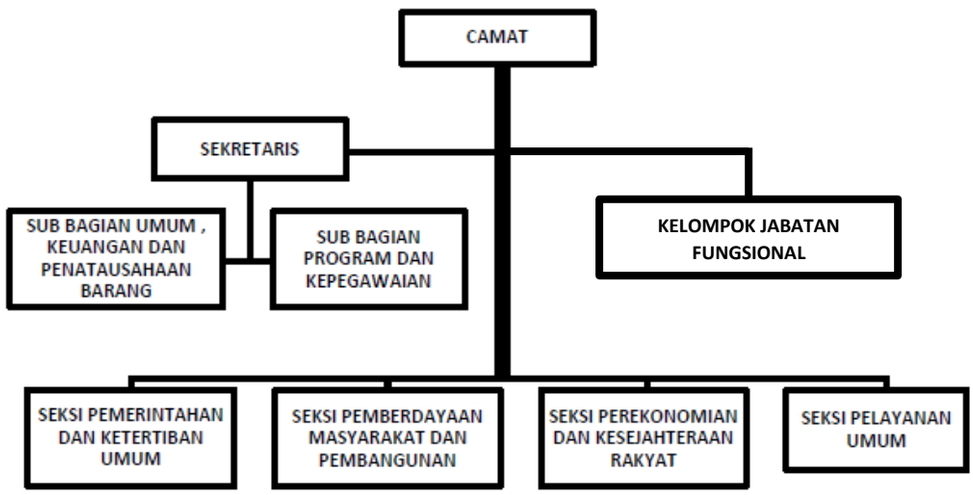

Kedudukan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas :

1) Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kota Blitar yang ada di kecamatan;
9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
2) Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
4) Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
5) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
6) Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
7) Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
8) Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
9) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;
10) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11) Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16) Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
18) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:
1) Camat;
2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
   a) Sub bagian Program dan Kepegawaian;
   b) Sub bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
3) Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
5) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
6) Seksi Pelayanan Umum.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada seksi, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Sekretaris menjalankan fungsi :
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Camat;
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing seksi seca terpadu;
c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seksi-seksi di lingkungan dinas;
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan sekretariat;
e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
h. Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
i. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi kecamatan;
j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha kecamatan;
k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan

penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

m. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan
n. pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
o. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
p. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
q. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
r. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
s. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
t. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
u. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing seksi;
v. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
w. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
x. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
    a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan;
    b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
    c) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub Bagian yaitu :

a. *Sub Bagian Program dan Kepegawaian* melaksanakan tugas :
    1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
    2. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi program dan kepegawaian ;
    3. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi program dan kepegawaian ;
    4. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing- masing unit di kecamatan dan kelurahan;
    5. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi pada Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
    6. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) kecamatan dan kelurahan;
7. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Penetepan Kinerja (PK);
8. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja ;
9. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi program dan kepegawaian;
12. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan;
13. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja di Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. *Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang* melaksanakan tugas :
1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang ;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
4. Melaksanakan dan mengelola surat–menyurat dan tata kearsipan;
5. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
6. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan;
7. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
8. Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
9. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
10. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

11. Melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana prasarana di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang– undangan;
12. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
13. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
14. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
15. Melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai ;
16. Menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan;
17. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang ;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum ;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemerintahan dan ketenteraman ketertiban umum;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
4. Melaksanakan inventarisasi tanah aset dan menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah aset;
5. Membantu penyelenggaraan Pemililihan Umum;
6. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Satpol PP, Polri dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
7. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
8. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi pertanahan/keagrariaan ;
9. Menyiapkan bahan pembinaan politik dan idiologi Negara ;
10. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Kelurahan dan penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi di Kelurahan;
11. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah bekas bengkok;
12. Membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
13. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan Pemerintah ;
14. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kesra kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah

kecamatan;

15. Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
16. Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
17. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
18. Menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
19. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daaerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
20. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban kecamatan ;
21. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan perlindungan masyarakat akibat pelanggaran HAM dan masalah sosial di kecamatan;
22. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
23. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
2. Mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
4. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan ;
5. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan;
6. Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan pengawasan penyaluran bantuan pembangunan;
7. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil kecamatan dan/ atau kelurahan ;
8. Melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
9. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
10. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah kecamatan;
11. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi

organisasi kemasyarakatan di kecamatan;
12. Melaksanakan pembinaaan dan monitoring terhadap pembangunan lingkungan hidup di kecamatan;
13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
14. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
15. Melaksanakan pembinaaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
16. Melakukan pendataan hasil kerja pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat kelurahan, usaha industri kecil dan menengah;
6. Fasilitasi penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular di kecamatan;
7. Fasilitasi penyiapan dan data serta memantau pelaksanaan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
8. Fasilitasi pembinaaan dan monitoring terhadap usaha-usaha ketahanan pangan dan pertanian;
9. Fasilitasi pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengembalian dana bergulir dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di kecamatan;
11. Menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
12. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
13. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan pengiriman, penyaluran dan pendistribusian bantuan-bantuan sosial;
14. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
15. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan publik;
2. Mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pelayanan publik;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum;
4. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan;
5. Menyiapkan dan mengevaluasi data sebagai bahan pembinaan penyusunan monografi kecamatan;
6. Melaksanakan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan kependudukan;
7. Menyusun dan melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
8. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
9. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik di wilayahnya;
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;
11. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
12. Melaksanakan pengelolaan data/ dokumentasi pelayanan publik;
13. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pelayanan umum;
14. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Kelurahan

Susunan Organisasi Kelurahan (Perwali Nomor 77 Tahun 2016)

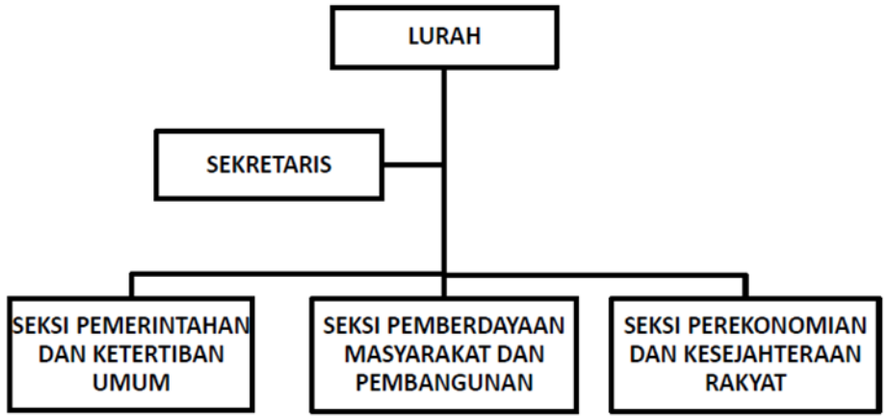

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dengan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Lurah menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kelurahan;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
5. Pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk

memperbaiki kualitas pelayanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
1. Lurah;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
3. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum (Trantibum);
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Lurah;
2. Mengkoordinasikan perencanaan program kerja masing – masing seksi secara terpadu;
3. Mengkoordinasikan dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Kelurahan;
4. Merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Kelurahan;
5. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA);
6. Menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
7. Mengkoordinasikan internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Kelurahan;
8. Mengelola urusan rumah tangga, tata usaha dan kehumasan serta keprotokolan;
9. Mengelola administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Kelurahan;
10. Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
11. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
12. Menyelenggarakan, membina dan mengendalikan pelayanan administrasi umum, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
13. Membantu mengelola administrasi kepegawaian di kelurahan;
14. Melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana prasarana di kelurahan sesuai dengan peraturan perundang– undangan;
15. Mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
16. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
17. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
18. Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Kelurahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
19. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Kelurahan;
20. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan bahan koordinasi di bidang pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
3. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
4. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
5. Melaksanakan penyusunan monografi kelurahan;
6. Melaksanakan inventarisasi tanah aset dan menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah aset;
7. Membantu pelaksanaan tugas–tugas di bidang administrasi pertanahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Fasilitasi kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu);
9. Membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan Pemungutan PBB;
10. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
11. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
12. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
13. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Satpol PP, Polri dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
14. Melakukan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
15. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan warga;
16. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Satuan perlindungan masyarakat (linmas);
17. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
18. Melakukan pendataan hasil kerja kegiatan

pemerintahan dan ketentraman ketertiban umum;
19. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, mempunyai tugas:
1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dalam forum musrenbang di kelurahan;
6. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kelurahan;
8. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
9. Menyiapkan bahan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
10. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan dan mengelola pemanfaatan, pelestarian serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan;
11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup;
12. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian terhadap peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kelurahan;
14. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:
1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan bahan koordinasi di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Penyusunan rencana program dan/atau kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

4. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular di kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
6. Menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
7. Menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
8. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah (UKM), peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan di kelurahan;
9. Menyiapkan bahan pemberdayaan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya di kelurahan ;
10. Melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat, usaha industri kecil dan menengah;
11. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakat di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, kepemudaan dan olahraga;
12. Melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengembalian dana bergulir dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah kelurahan;
13. Melakukan pengumpulan dan penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
14. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
15. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior di Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Sananwetan. Salah satu Sumber Daya Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Sananwetan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas dengan potensi sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Sananwetan berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pasca Sarjana (S2)	4	3	7
2	Sarjana (S1)/ Diploma IV	24	28	52
3	Diploma III	2	4	6
4	Diploma II	0	1	1
5	Diploma I	0	0	0
6	SMA	14	10	24
7	SMP	0	0	0
8	SD	1	0	1
Jumlah		45	46	91

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sananwetan, Juli 2025

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Sananwetan berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pembina Tk.I (IVb)	1	-	1
2	Pembina (IVa)	1	1	2
3	Penata Tk. I (IIId)	-	5	5
4	Penata (III/c)	9	14	23
5	Penata Muda Tk I (III/b)	8	5	13
6	Penata Muda (III/a)	14	16	30
7	Pengatur Tk I (II/d)	1	1	2
8	Pengatur (II/c)	1	1	2
9	Juru (I/c)	1	-	1
10	Penata Muda/IX	5	2	7
11	Pengatur/VII	1	-	1
12	Pengatur Muda/V	4	-	4
TOTAL PEGAWAI		46	45	91

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sananwetan, Juli 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Sananwetan berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
	PNS			
1	Camat Sananwetan	1	-	1
2	Sekretaris Camat	-	1	1
3	Lurah	5	1	6
4	Sekretaris Lurah	4	3	7
5	Kasubag.Program dan Kepegawaian	-	1	1
6	Kasubag.Umum Keuangan dan Penatausahaan Barang	-	1	1
7	Kasi. Pelayanan Umum	-	1	1
8	Kasi Perekonomian dan Kesra	-	7	7
9	Kasi.Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	-	7	7
10	Kasi.Pemerintahan dan Trantibum	6	-	6

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sananwetan, Juli 2025

Kecamatan Sananwetan memiliki kekayaan/aset

peralatan dan sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Sananwetan berdasarkan kondisi

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH BERDASARKAN KONDISI	
		BAIK	RUSAK
KECAMATAN SANANWETAN			
1	AC	10	-
2	Komputer PC	8	-
3	Komputer All In One	8	-
4	Laptop	11	1
5	Tab/HP	1	-
6	Kamera	1	-
7	Printer	17	-
8	Scanner	2	-
9	LCD	2	-
10	Mobil Dinas Jabatan	2	-
11	Mobil Operasional	1	1
12	Sepeda Motor	8	1
13	TV	2	-
14	CCTV	6	5
15	Meja Kursi Tamu	5	-
16	Meja Kerja	11	7
17	Meja Rapat	10	-
18	Meja Pimpinan Rapat	2	-
19	Meja Pelayanan	2	-
20	Kursi Rapat	100	-
21	Kursi Pimpinan	8	-
22	Kursi Tunggu	3	-
23	Genset	1	-
24	Kulkas	3	-
25	Kipas Angin	6	-
26	Portable Sound	2	-
27	Sound System	-	1
28	Tiang Umbul -Umbul	7	-
29	Almari Arsip	9	-
30	Bangunan Kantor	1	-
31	Rumah Dinas	1	-
32	Tanah Bangunan Kantor	1	-
33	Tanah Untuk Candi	1	-
KELURAHAN GEDOG			
1	Tanah Aset	85023 m^2	
2	AC	3	-
3	Komputer PC	1	8
4	Komputer All In One	4	-
5	Laptop	2	1
6	Tab/HP	2	-
7	Kamera	1	-
8	Printer	4	4
9	Scanner	2	-
10	LCD	1	-
11	Sepeda Motor	6	-
12	TV	1	-
13	CCTV	2	-
14	Meja Kursi Tamu	2	-
15	Meja Kerja	8	-

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH BERDASARKAN KONDISI	
		BAIK	RUSAK
16	Meja Rapat	4	-
17	Meja Pimpinan Rapat	1	-
18	Meja Pelayanan	1	-
19	Kursi Rapat	20	-
20	Kursi Pimpinan	1	5
21	Kursi Tunggu	3	-
22	Genset	1	-
23	Kulkas	1	-
24	Kipas Angin	1	-
25	Sound System	1	-
26	Tiang Umbul -Umbul	7	-
27	Almari Arsip	3	-
28	Bangunan Kantor	1	-
29	Tanah Untuk Candi	1	-
KELURAHAN PLOSOKEREP			
1	Tanah Aset	40537 m^2	
2	AC	5	-
3	Komputer PC	1	-
4	Komputer All In One	3	-
5	Laptop	6	2
6	Tab/HP	1	2
7	Kamera	1	-
8	Printer	7	7
9	LCD	1	
10	Sepeda Motor	5	-
11	TV	1	-
12	CCTV	7	1
13	Meja Kursi Tamu	1	-
14	Meja Kerja	8	-
15	Meja Rapat	4	-
16	Meja Pimpinan Rapat	2	-
17	Meja Pelayanan	1	-
18	Kursi Rapat	53	-
19	Kursi Pimpinan	4	-
20	Kursi Tunggu	2	-
21	Genset	-	1
22	Kulkas	1	
23	Kipas Angin	3	4
24	Portable Sound	1	-
25	Sound System	1	-
26	Tiang Umbul -Umbul	10	10
27	Almari Arsip	5	1
28	Bangunan Kantor	1	-
29	Tanah Bangunan Kantor	1	-
KELURAHAN KLAMPOK			
1	Tanah Aset	76096 m^2	
2	AC	3	-
3	Komputer PC	2	-
4	Komputer All In One	2	-
5	Laptop	3	2
6	Printer	7	-
7	Scanner	1	1
8	LCD	1	-
9	Sepeda Motor	7	-
10	TV	-	1
11	CCTV	8	-
12	Meja Kursi Tamu	2	-
13	Meja Kerja	8	-

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH BERDASARKAN KONDISI	
		BAIK	RUSAK
14	Meja Rapat	2	-
15	Meja Pimpinan Rapat	1	-
16	Meja Pelayanan	1	-
17	Kursi Rapat	50	-
18	Kursi Pimpinan	1	-
19	Kursi Tunggu	2	-
20	Genset	1	-
21	Kulkas	1	-
22	Kipas Angin	1	-
23	Portable Sound	1	-
24	Almari Arsip	1	-
25	Bangunan Kantor	1	-
26	Tanah Bangunan Kantor	1	-
KELURAHAN SANANWETAN			
1	Tanah Aset	25441 m^2	
2	AC	3	5
3	Komputer PC	2	1
4	Komputer All In One	2	-
5	Laptop	5	5
6	Kamera	1	-
7	Printer	5	2
8	Scanner	1	-
9	LCD	1	-
10	Sepeda Motor	6	-
11	TV	2	1
12	Meja Kursi Tamu	2	-
13	Meja Kerja	6	-
14	Meja Rapat	3	1
15	Meja Pimpinan Rapat	1	-
16	Meja Pelayanan	1	-
17	Kursi Rapat	36	14
18	Kursi Pimpinan	1	-
19	Kursi Tunggu	2	-
20	Genset	1	-
21	Kulkas	1	-
22	Kipas Angin	2	-
23	Portable Sound	1	-
24	Sound System	2	4
25	Tiang Umbul -Umbul	2	-
26	Almari Arsip	4	-
27	Bangunan Kantor	1	2
28	Tanah Bangunan Kantor	1	-
KELURAHAN REMBANG			
1	Tanah Aset	29908 m^2	
2	AC	6	-
3	Komputer PC	-	1
4	Komputer All In One	3	-
5	Laptop	7	-
6	Tab/HP	-	1
7	Kamera	7	2
8	Printer	1	-
9	Scanner	1	-
10	Sepeda Motor	7	-
11	TV	3	-
12	Meja Kursi Tamu	3	-
13	Meja Kerja	5	-
14	Meja Rapat	2	-
15	Meja Pimpinan Rapat	2	-

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH BERDASARKAN KONDISI	
		BAIK	RUSAK
16	Meja Pelayanan	1	-
17	Kursi Rapat	39	-
18	Kursi Pimpinan	1	-
19	Kursi Tunggu	2	2
20	Genset	1	
21	Kulkas	1	0
22	Kipas Angin	3	4
23	Sound System	1	-
24	Tiang Umbul -Umbul	10	-
25	Almari Arsip	5	-
26	Bangunan Kantor	1	-
27	Rumah Dinas	1	-
28	Tanah Bangunan Kantor	1	-
KELURAHAN KARANGTENGAH			
1	Tanah Aset	97538 m^2	
2	AC	3	1
3	Komputer PC	3	1
4	Komputer All In One	3	1
5	Laptop	6	2
6	Tab/HP	1	-
7	Kamera	-	1
8	Printer	3	1
9	LCD	1	-
10	Sepeda Motor	6	1
11	TV	-	1
12	CCTV	1	-
13	Meja Kursi Tamu	1	-
14	Meja Kerja	8	-
15	Meja Rapat	-	1
16	Meja Pelayanan	1	-
17	Kursi Rapat	70	-
18	Kursi Pimpinan	8	1
19	Kursi Tunggu	2	-
20	Genset	1	-
21	Kulkas	1	1
22	Kipas Angin	1	-
23	Portable Sound	-	1
24	Sound System	1	-
25	Almari Arsip	1	1
26	Bangunan Kantor	1	-
27	Tanah Bangunan Kantor	1	-
KELURAHAN BENDOGERIT			
1	Tanah Aset	36024 m^2	
2	AC	4	-
3	Komputer PC	1	-
4	Komputer All In One	3	-
5	Kamera	1	-
6	Printer	9	-
7	LCD	1	-
8	Sepeda Motor	6	-
9	TV	1	-
10	CCTV	4	-
11	Meja Kursi Tamu	3	-
12	Meja Kerja	10	-
13	Meja Rapat	1	-
14	Meja Pimpinan Rapat	1	-
15	Meja Pelayanan	1	-
16	Kursi Rapat	100	-

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH BERDASARKAN KONDISI	
		BAIK	RUSAK
17	Kursi Pimpinan	10	-
18	Kursi Tunggu	3	-
19	Genset	1	-
20	Kulkas	1	-
21	Kipas Angin	2	-
22	Portable Sound	1	-
23	Sound System	1	-
24	Tiang Umbul -Umbul	4	-
25	Almari Arsip	5	-
26	Bangunan Kantor	1	-
27	Tanah Bangunan Kantor	1	-

Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa sarana dan prasarana kantor pada umumnya masih mampu menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Sebagian besar peralatan utama, seperti meja, kursi, dan perangkat penunjang ruang kerja, masih berada dalam kondisi baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, terdapat pula sejumlah sarana dengan kondisi rusak atau mengalami penurunan kualitas, antara lain perangkat teknologi informasi, mesin cetak, serta beberapa fasilitas ruang rapat yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana tidak bersifat menyeluruh, melainkan lebih terarah pada penggantian peralatan yang rusak dan peremajaan terhadap sarana yang sudah tidak efisien, serta penambahan fasilitas yang jumlahnya belum memadai. Di samping itu, diperlukan pula upaya pemeliharaan secara berkala terhadap sarana yang masih dalam kondisi baik agar umur pakai lebih panjang dan daya guna tetap optimal.

Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang tepat, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang kondusif, peningkatan efisiensi pelaksanaan tugas, serta pelayanan publik yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan di Kecamatan Sananwetan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, maka sebagai perangkat daerah yang mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan urusan pelayanan masyarakat sehingga Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Selain itu Kecamatan juga mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan kemampuan akses kepada masyarakat yang demikian dekat maka kecamatan memiliki peran yang strategis bagi pemerintah.

Program-program yang dijalankan oleh Kecamatan Sananwetan bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi perangkat daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program- program pemerintah. Program–program yang ditetapkan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sananwetan dan pengelolaan pendanaan digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sananwetan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian pada Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan**	IKU	**Baik (84)**	Baik (86)	Baik(88)	Sangat Baik(89)	Baik (83,14)	Baik (87,98)	Baik(88,14)	Sangat Baik(90,62)	98,98%	102,20%	100,16%	101,82%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	Baik (82)	Baik (83)	Baik(84)	Baik (84)	Baik (84,63)	Baik (88,60)	Baik (89,50)	Baik (88,08)	103,21%	106,75%	106,55%	104,86%
3	Status Kinerja Kecamatan	IKU	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang"	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sananwetan yang mana merupakan Tujuan Kecamatan Sananwetan, yaitu "meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan" dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 9 variabel yaitu Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/ tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana sesuai PermenPAN RB no 14 tahun 2017 yang dihitung sesuai aplikasi e-sukma Provinsi Jawa Timur.

Aktivitas pelayanan publik memang selayaknya memperhatikan kepuasan masyarakat karena hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang diterima dari penyelenggara pelayanan. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka menunjukkan semakin tinggi pula mutu pelayanan yang dilaksanakan.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dapat dilihat melalui grafik berikut :

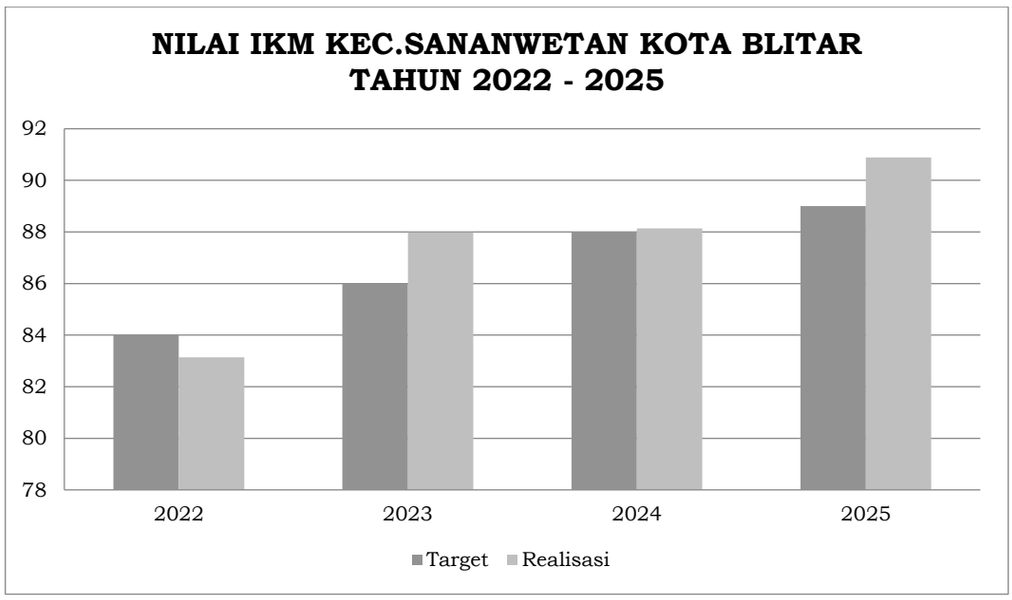

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2025 pada Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Dalam jangka waktu 3 tahun terus mengalami kenaikan. Nilai IKM Tahun 2025 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada semester 1 berada pada angka 90,89 dengan predikat sangat baik, meningkat sebesar 2,75 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 88,14 dengan predikat baik.

Peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar selama periode 2023 hingga 2025 tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung. Pertama, adanya komitmen yang kuat dari pimpinan beserta seluruh aparatur dalam menjaga konsistensi pelaksanaan standar pelayanan, sehingga kualitas layanan kepada masyarakat dapat terus meningkat. Kedua, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi turut memperkuat profesionalisme serta responsivitas aparatur dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam mempercepat proses pelayanan, memperluas aksesibilitas, serta menjamin transparansi. Selanjutnya, partisipasi masyarakat melalui umpan balik dan survei kepuasan menjadi faktor krusial dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga hasil pelayanan lebih sesuai dengan harapan masyarakat.

Sasaran I di Kecamatan Sananwetan, adalah "Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah" dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator diukur dengan menggunakan aplikasi e-Sukma Jatim yang mengandung 9 unsur pelayanan kepegawaian terhadap pegawai di lingkungan Kecamatan Sananwetan.

Sasaran II adalah "Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan" dengan indikator Status Kinerja Kecamatan dan Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang". Status kinerja kecamatan adalah hasil evaluasi atas instrumen penilaian sinergitas kinerja kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan, Instrumen penilaian tersebut mencakup 10 indikator kinerja pelayanan publik tingkat kecamatan dan 7 indikator kinerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan PP no. 17 tahun 2018. Status kinerja kecamatan diperoleh dari evaluasi Provinsi Jawa timur. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan melalui isian formulir evaluasi diri yang ada didalam aplikasi epdeskel berdasarkan Permendagri no. 81 tahun 2015 evaluasi epdeskel terdiri dari 3 kategori yaitu kelurahan dengan tingkat perkembangan "kurang berkembang", "berkembang" dan "cepat berkembang" dengan kategori tertinggi adalah "cepat berkembang".

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Sananwetan adalah seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, termasuk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memiliki izin tinggal di wilayah tersebut. Layanan Kecamatan Sananwetan ditujukan untuk semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau latar belakang sosial ekonomi. Tujuan dari pelayanan Kecamatan Sananwetan adalah untuk memberikan layanan publik yang prima, memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat, serta menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Sananwetan secara lebih rinci meliputi:

1. Warga masyarakat
   Semua penduduk yang ber-KTP di wilayah Kecamatan Sananwetan, serta penduduk non-permanen yang tinggal di wilayah tersebut.
2. Lembaga dan organisasi
   Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, perusahaan, dan berbagai jenis organisasi lainnya yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sananwetan
3. Kelompok rentan

Termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan perhatian khusus dalam pelayanan.

4. Perangkat daerah
   Layanan juga ditujukan untuk mendukung kinerja perangkat daerah di tingkat Kecamatan Sananwetan dan kelurahan, seperti kelurahan dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya.

2.1.5 Mitra Kecamatan Sananwetan dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah sangat dibutuhkan dalam pemberian pelayanan yang optimal. Kecamatan Sananwetan mempunya beberapa mitra antara lain sebagai berikut :

a. Mitra Kerja Internal
   1. Kelurahan se-Kecamatan Sananwetan dalam rangka kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan
   2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mitra kerja dalam hal layanan penerbitan akta kelahiran, penerbitan akta kematian, penerbitan kartu keluarga di kecamatan, perekaman dan pencetakan KTP-el, pelayanan kartu identitas anak (KIA) tuntas di kecamatan, pelayanan penerbitan surat keterangan pindah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
   3. Dinas DP3AP2KB Kota Blitar mitra kerja dalam hal pelayanan penanganan stunting
   4. Dinas Kesehatan Kota Blitar mitra kerja dalam hal pelayanan kesehatan yang berkoordinasi dengan Puskesmas sebagai unit pelaksana dari Dinas Kesehatan.
   5. Dinas Sosial Kota Blitar mitra kerja dalam hal pembagian bantuan sosial ke masyarakat kurang mampu dan disabilitas
   6. Dinas Pendidikan Kota Blitar mitra kerja dalam hal pelayanan pendidikan di masyarakat
   7. Dinas Lingkungan Kota Blitar Hidup mitra kerja dalam hal bank sampah, kelurahan berseri dan proklim
   8. Dinas PUPR Kota Blitar mitra kerja dalam hal pembangunan di kelurahan
   9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mitra kerja dalam program kelurahan berseri dan proklim
   10. Dinkominfotik mitra kerja dalam komunikas media sosial perangkat daerah

b. Mitra Kerja Eksternal
   1. Kemenag Kota Blitar mitra kerja dalam hal pelayanan pencatatan pernikahan berkerjasama dengan KUA.
   2. Tokoh agama merupakan mitra kerja kecamatan dalam pembinaan masyarakat, penguatan kerukunan umat beragama, serta penyampaian program pemerintah agar lebih mudah diterima oleh masyarakat.
   3. Koramil dan Polsek Sananwetan dalam rangka menjaga keamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Sananwetan
   4. BAZNAS mitra kerja dalam hal penyaluran zakat dan infaq
   5. BPJS Ketenagakerjaan mitra kerja dalam hal asuransi ketenagakerjaan pegawai THL dan P3N.

6. BPJS Kesehatan dalam hal pelayanan asuransi kesehatan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sananwetan mendapat dukungan dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) antara lain dukungan pembayaran jasa tenaga pelayanan umum kerja modin kematian muslim laki-laki, modin kematian muslim perempuan, dan modin kematian non muslim melalui Bank Kota Blitar. PDAM selaku BUMD memastikan askes air bersih serta mengadakan program sambungan baru untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sananwetan dalam melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut :

- Kerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar terkait Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelaksanaan Program Pelayanan Kunjungan Terpadu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar (LAKU TEPAK). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberdayakan semua Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anak binaan yang meliputi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Remaja, pelatihan pertanian, teknik perbengkelan, peningkatan mental dan spiritual anak.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Analisis terhadap isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan dan solusi atas berbagai kondisi tidak ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal.

2.2.1 Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Kecamatan Sananwetan Kota Blitar memiliki berbagai potensi daerah yang dapat mendukung pembangunan wilayah. Dari aspek pariwisata, terdapat sejumlah destinasi yang memiliki nilai sejarah dan daya tarik tersendiri, antara lain Kali Karplos, Sumber Kalibalang, Cagar Budaya Candi Gedog, serta Sae Murasan Heritage yang menjadi bagian dari warisan budaya lokal. Dalam bidang pendidikan, Kecamatan Sananwetan juga didukung oleh keberadaan berbagai lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, seperti Universitas Islam Balitar (UNISBA), Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes), serta beberapa SD, SMP, dan SMA sederajat, yang berperan dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas. Di bidang kesehatan, ketersediaan fasilitas seperti Puskesmas dan RSUD Mardi Waluyo turut memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan kelompok-kelompok UMKM menjadi potensi ekonomi produktif yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi lainnya adalah situasi kerukunan umat beragama yang kondusif, yang menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Selain potensi di bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, UMKM, dan kerukunan umat beragama, Kecamatan Sananwetan juga memiliki potensi lain yang dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi peluang strategis untuk memperkuat transformasi digital pelayanan publik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, kewenangan kecamatan dalam mengoordinasikan urusan ketenteraman dan ketertiban masyarakat juga merupakan potensi penting yang dapat memperkuat stabilitas wilayah serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi aktivitas sosial maupun ekonomi. Selain itu, Kecamatan Sananwetan memiliki potensi masyarakat usia produktif yang cukup besar, serta kelompok rentan yang apabila diberdayakan secara tepat dapat menjadi kekuatan sosial dan ekonomi baru. Pemberdayaan ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan di tingkat kecamatan.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sananwetan dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan, permasalahan Kecamatan Sananwetan yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik belum optimal, sehingga beberapa proses masih berlangsung secara manual dan memerlukan waktu lebih lama;
2. Koordinasi antar instansi dalam menjaga ketertiban masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal kejelasan peran dan respon cepat di lapangan;
3. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan belum merata, terutama di kalangan usia produktif dan kelompok rentan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Sananwetan dalam lima tahun mendatang. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Kecamatan Sananwetan mengharapkan kebijakan dan dukungan

sebagai berikut;

1. Mewujudkan layanan publik digital terpadu melalui pengembangan aplikasi pelayanan dan pelatihan aparatur secara berkelanjutan, dengan dukungan penyediaan infrastruktur teknologi serta pendampingan teknis agar proses manual dapat diminimalisir.
2. Membentuk pusat koordinasi terpadu dengan SOP yang jelas, didukung sistem komunikasi *real-time*, sehingga respon cepat dan peran masing-masing instansi lebih terarah.
3. Mengembangkan program pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal yang inklusif, dengan dukungan pelatihan keterampilan, fasilitasi akses modal, agar usia produktif dan kelompok rentan lebih terlibat aktif.

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Indonesia harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim, dimana beberapa wilayah di Indonesia mengalami bencana alam yang mempengaruhi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Di tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-2 di dunia dalam jumlah sampah plastik yang masuk ke laut, dengan total lebih dari 3,2 juta ton. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga lingkungan dan melakukan tindakan pencegahan dalam mengatasi perubahan iklim menjadi isu strategis nasional yang harus diperhatikan. Isu strategis nasional tentang lingkungan hidup di Indonesia adalah pencegahan dan penanganan perubahan iklim serta mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang semakin serius.

Dalam isu strategis nasional lingkungan hidup, perlu adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang lebih baik. Pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi tujuan dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 20 tahun ke depan.

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyususnan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025 -2029 menetapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah analisis sitematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD. Dengan demikian RPJMD menjadikan KLHS sebagai bahan dasar untuk Menyusun perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan.

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar tahun 2011 – 2030 dan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Blitar Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar tahun 2017-2037, Kecamatan Sananwetan masuk dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) 4. Sebagaimana telaahan Perubahan Renstra Provinsi, telaahan terhadap RTRW dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Blitar Tahun 2021-2026, pada pelaksanaannya peran Kecamatan dan Kelurahan dalam pengendalian tata ruang sangat diperlukan.

Dalam Dokumen KLHS menyebutkan isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Keterkaitan Program yang ada pada Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan ditunjukkan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sejalan dengan analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada pilar Ekonomi dan Sosial utamanya tema besar pengembangan ekonomi lokal, Kemiskinan dan

peningkatan kesadaran hidup sehat masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sejalan dengan analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada pilar Lingkungan dan Tata Kelola. Dengan demikian dalam pelaksanaannya Kecamatan Sananwetan akan mengacu pada telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011. Apabila dikomparasikan sasaran dalam Perubahan Renstra Kecamatan Sananwetan dan dokumen KLHS RPJMD Kota Blitar dapat ditarik sinergi walaupun tidak persis sama, namun subtansi pemberdayaan masyarakat menjadi capaian kinerja menjadi muara tujuannya.

Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Blitar merupakan salah satu tahapan penting dalam kajian KLHS. Perumusan isu strategis PB dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data – data sekunder yang ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029 dan berdasarkan identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian lainnya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan (stakeholders) pihak- pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Blitar, baik atas nama individu maupun lembaga.

Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan skenario dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji public yang menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis jangka menengah Kota Blitar. Isu yang relevan dengan Kecamatan Sananwetan terkait KLHS meliputi :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance): Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, dan bebas pungli;
2. Meningkatkan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat.

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis daerah akan menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi kecamatan, Kecamatan Sananwetan berhubungan erat dengan isu global segala sesuatu adalah layanan. Everything is a Service (EIS) adalah pandangan yang menegaskan bahwa semua sesuatu, baik itu produk, layanan, atau teknologi, sebenarnya adalah sebuah layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam EIS, layanan diartikan sebagai suatu bentuk interaksi antara pihak-pihak yang

terkait, seperti konsumen dan penyedia layanan, untuk mencapai tujuan tertentu. Layanan dapat berupa produk, jasa, atau teknologi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Manfaat EIS: meningkatkan kualitas layanan dengan cara memfokuskan pada kebutuhan dan keinginan konsumen; meningkatkan efisiensi dengan cara mengintegrasikan proses-proses bisnis dan mengurangi biaya; dan meningkatkan keamanan dengan cara melindungi data dan informasi konsumen.

Konsep "Segala Sesuatu adalah Layanan" menegaskan bahwa semua sesuatu sebenarnya adalah sebuah layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Namun demikian, EIS juga menimbulkan beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kemampuan mereka, dan keterlambatan pengiriman.

Dalam konteks pembangunan daerah, terdapat sejumlah isu nasional yang perlu menjadi perhatian perangkat daerah karena memiliki relevansi langsung terhadap tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Isu-isu tersebut antara lain :

1. Program pemberdayaan yang belum terintegrasi untuk peningkatan kemandirian masyarakat;
2. Tata kelola pemerintahan desa belum baik.

Pada tingkat regional, salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur dan pelayanan yang efisien sangat penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kombinasi strategi penegakan hukum yang humanis, edukatif dan persuasif, serta partisipasi masyarakat, dan reformasi tata kelola pemerintahan merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang berkelanjutan.

Kombinasi strategis dimaksudkan untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan strategis dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Trantibumlinmas, melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi, pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan, sehingga integrasi data dan penanganan gangguan Trantibumlinmas di Jawa Timur dapat dioptimalkan. Selain itu Provinsi Jawa Timur perlu akan adanya kepemimpinan lokal yang berwawasan global, berlandaskan kearifan lokal yang dapat menggerakkan masyarakatnya untuk berwawasan global namun tetap berpijak pada landasan nilai-nilai budayanya sebagai kearifan lokal.

2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dari permasalahan diatas, Kecamatan Sananwetan menentukan isu strategis yaitu, “Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan Sananwetan”.

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan;
2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum;
3. Masih rendahnya koordinasi dalam penanganan respon cepat di lapangan;
4. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.6
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1. Tersedianya sarana prasarana TIK untuk mendukung pelayanan publik 2. Kewenangan Kecamatan dalam koordinasi ketenteraman dan ketertiban 3. Potensi masyarakat usia produktif dan kelompok rentan untuk diberdayakan	1. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik belum optimal, sehingga beberapa proses masih manual 2. Koordinasi antar instansi dalam menjaga ketertiban masih menghadapi kendala kejelasan peran dan respon cepat di lapangan 3. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan belum merata	1. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance): Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, dan bebas pungli 2. Meningkatkan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat	Segala sesuatu adalah layanan	1. Program pemberdayaan yang belum terintegrasi untuk peningkatan kemandirian masyarakat 2. Tata kelola pemerintahan desa belum baik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan 2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum 3. Masih rendahnya koordinasi dalam penanganan respon cepat di lapangan 4. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat 5. Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan, perlu dicermati isu-isu strategis yang berkembang baik di tingkat nasional maupun regional. Pada lingkup nasional, masih dijumpai program pemberdayaan yang belum terintegrasi secara optimal untuk mendorong kemandirian masyarakat, serta tata kelola pemerintahan desa yang belum berjalan dengan baik. Sementara itu, pada lingkup regional, tantangan utama terletak pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik, sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Keseluruhan isu ini menjadi pijakan penting bagi Kecamatan Sananwetan dalam merumuskan langkah strategis demi tercapainya tujuan pembangunan yang berdaya guna dan tepat sasaran.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Sananwetan memiliki keterkaitan erat dengan Misi ke-3 Kota Blitar, yaitu “Mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis smart governance”. Misi tersebut menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam setiap proses pembangunan. Sejalan dengan misi tersebut, sasaran pembangunan yang ingin dicapai Kota Blitar adalah “Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi”. Dalam hal ini, Kecamatan Sananwetan berperan penting melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel dengan dukungan pemanfaatan sarana prasarana teknologi informasi. Selain itu, sasaran kecamatan juga diarahkan pada penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat produktif maupun kelompok rentan. Seluruh langkah strategis tersebut secara langsung mendukung tercapainya pelayanan pemerintahan yang terintegrasi dan berkualitas, sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Kecamatan Sananwetan dalam merealisasikan Misi ke-3 Kota Blitar.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 9 variabel yaitu Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/ tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana sesuai PermenPAN RB no 14 tahun 2017 yang dihitung sesuai aplikasi e-sukma Provinsi Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan hasil e-sukma	88,14	Indeks	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90,25)	Sangat Baik (90,50)	Sangat Baik (90,75)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (91)	IKU
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan perangkat daerah sesuai PermenPAN RB No. 14 tahun 2017 atau aturan lain pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM tertimbang x 25 NRR IKM tertimbang = NRR per unsur x (0,111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai Rata - Rata	Baik (89,50)	Indeks	Baik (84)	Baik (84.50)	Baik (85.00)	Baik (85.50)	Baik (86.00)	Baik (86.50)	Baik (86.50)	-

Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Status Kinerja Kecamatan	Status kinerja kecamatan adalah hasil evaluasi atas instrumen penilaian sinergitas kinerja kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan, Instrumen penilaian tersebut mencakup 10 indikator kinerja pelayanan publik tingkat kecamatan dan 7 indikator kinerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan PP no. 17 tahun 2018	Status kinerja kecamatan pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi provinsi	Baik		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU
	Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang"	evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan melalui isian formulir evaluasi diri yang ada didalam aplikasi epdeskel berdasarkan Permendagri no. 81 tahun 2015 evaluasi epdeskel terdiri dari 3 kategori yaitu kelurahan dengan tingkat perkembangan "kurang berkembang", "berkembang" dan "cepat berkembang" dengan kategori tertinggi adalah "cepat berkembang"	(Jumlah kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang" dibagi jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	IKU

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah–langkah berisikan program– program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan–kebijakan dan program.

Penentuan Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan- kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel. 3.2
Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhaaan regulasi dengan fokus Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui pengembangan sistem layanan digital dan integrasi data pelayanan masyarakat
	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Umum sesuai ketentuan yang berlaku
	Masih rendahnya koordinasi dalam penanganan respon cepat di lapangan	Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Trantibbum
	Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang pertisipatif dan berkelanjutan
		Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Tabel. 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan layanan dasar dan infrastruktur kecamatan untuk mendukung SDM Unggul dan Berkelanjutan	Mewujudkan Kecamatan Cerdas melalui tata kelola digital dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Inovasi dan Kolaborasi Kecamatan dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata	Optimalisasi potensi ekonomi lokal dalam mendukung stabilitas ekonomi menuju kota yang maju	Akselerasi Pembangunan Kecamatan Berbasis Kesejahteraan, Inovasi Ekonomi, dan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Tabel. 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhaaan regulasi dengan fokus Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya	Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi	Optimalisasi Aplikasi Pelayanan Publik	
			Optimalisasi integrasi data pelayanan masyarakat melalui Aplikasi A Data	
			Optimalisasi fasilitasi pelayanan agraria, pengelolaan tanah dan aset daerah, penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
			Penguatan kapasitas dan pembinaan berkelanjutan bagi pengurus RT/RW dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah	
		Penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan dasar	Penyusunan SOP Bersama dalam rangka optimalisasi sistem respon cepat penanganan trantibbum	
			Penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam rangka menjaga stabilitas wilayah dan mendukung ketenteraman serta ketertiban masyarakat	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			Peningkatan sinergi dan kolaborasi melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memperkuat deteksi dini serta menjaga kerukunan sosial-keagamaan di masyarakat	
			Mendorong pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara partisipatif sebagai wadah utama penyerapan aspirasi masyarakat	
			Menyelenggarakan berbagai program pelatihan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menumbuhkan semangat wirausaha dan pengembangan UMKM lokal	
			Memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana umum yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan	
			Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan promosi	
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kecamatan (LKK)	
			Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas korupsi	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku	
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Tabel. 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	:	Kota Blitar Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan	
Misi	:	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance	
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui pengembangan sistem layanan digital dan integrasi data pelayanan masyarakat	Optimalisasi Aplikasi Pelayanan Publik
			Optimalisasi integrasi data pelayanan masyarakat melalui Aplikasi A Data
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Umum sesuai ketentuan yang berlaku	Optimalisasi fasilitasi pelayanan agraria, pengelolaan tanah dan aset daerah, penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
			Penguatan kapasitas dan pembinaan berkelanjutan bagi pengurus RT/RW dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan

Visi	**:**	**Kota Blitar Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan**	
Misi	**:**	**Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance**	
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah
		Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Trantibbum	Penyusunan SOP Bersama dalam rangka optimalisasi sistem respon cepat penanganan trantibbum
			Penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam rangka menjaga stabilitas wilayah dan mendukung ketenteraman serta ketertiban masyarakat
			Peningkatan sinergi dan kolaborasi melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memperkuat deteksi dini serta menjaga kerukunan sosial-keagamaan di masyarakat
		Peningkatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang pertisipatif dan berkelanjutan	Mendorong pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara partisipatif sebagai wadah utama penyerapan aspirasi masyarakat
			Menyelenggarakan berbagai program pelatihan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menumbuhkan semangat wirausaha dan pengembangan UMKM lokal
			Memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana umum yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan
		Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan promosi
			Pembinaan lembaga kemasyarakatan kecamatan (LKK)
			Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Sananwetan selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Sananwetan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Sananwetan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Blitar selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program – program Kecamatan Sananwetan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Sananwetan							
Unsur penunjang urusan pemerintahan - urusan kewilayahan - Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan		
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di Kecamatan			Status Kinerja Kecamatan		
					Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang"		
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum		
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan		
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan		
					Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM		
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	7.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Gedog							
Unsur penunjang urusan pemerintahan - urusan kewilayahan - Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum		
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan		
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan		
					Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
7.01.0.00.0.00.03.0002 - Kelurahan Plosokerep							
Unsur penunjang urusan pemerintahan - urusan kewilayahan - Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum		
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan		
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan		
					Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM		
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Klampok							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
Unsur penunjang urusan pemerintahan - urusan kewilayahan - Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum		
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan		
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan		
					Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM		
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Sananwetan							
Unsur penunjang urusan pemerintahan - urusan kewilayahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan dan		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
- Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi		pembangunan wilayah di Kecamatan	penyelenggaraan pemerintahan		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan		
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan		
					Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM		
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahtaeraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Rembang							
Unsur penunjang urusan pemerintahan - urusan kewilayahan - Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
berkualitas dan terintegrasi					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan		
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan		
					Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM		
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Karangtengah							
Unsur penunjang urusan pemerintahan - urusan kewilayahan - Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum		
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan		
				Meningkatnya penyelenggaraan	Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM		
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				kesejahtaeraan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.03.0007 - Kelurahan Bendogerit							
Unsur penunjang urusan pemerintahan - urusan kewilayahan - Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum		
					Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan		
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan		
					Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar	Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM		
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan perekonomian dan	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				kesejahtaeraan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sananwetan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kecamatan Sananwetan																			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standart adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standart Pelayanan yang telah Ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standart / ketentuan yang berlaku .....x100 % Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan x 100%	100	100	15.625.822.158,00	100	15.465.611.550,00	100	15.620.267.670,00	100	15.423.745.267,00	100	15.753.418.487,00	100	77.888.865.132,00	Kecamatan Sananwetan	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	22.550.000,00	100	143.598.538,00	100	143.596.237,00	100	139.596.237,00	100	139.596.237,00	100	588.937.249,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Program dan Kepegawaian
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	12	3	6.600.000,00	3	6.600.000,00	3	6.600.000,00	3	6.600.000,00	3	6.600.000,00	15	33.000.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Program dan Kepegawaian
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/ semesteran/ tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	-	7	12.100.000,00	7	40.498.538,00	7	40.496.237,00	7	36.496.237,00	7	36.496.237,00	35	166.087.249,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Program dan Kepegawaian

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	-	1	1.100.000,00	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00	1	72.000.000,00	5	289.100.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Program dan Kepegawaian
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	-	1	1.100.000,00	1	5.600.000,00	1	5.600.000,00	1	5.600.000,00	1	5.600.000,00	5	23.500.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Program dan Kepegawaian
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaam gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	-	9	550.000,00	9	3.300.000,00	9	3.300.000,00	9	3.300.000,00	9	3.300.000,00	45	13.750.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Program dan Kepegawaian
7.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	-	1	1.100.000,00	1	15.600.000,00	1	15.600.000,00	1	15.600.000,00	1	15.600.000,00	5	63.500.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Program dan Kepegawaian

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan															
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar --- Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani x 100 %	100	100	11.253.407.325,00	100	10.869.398.179,00	100	11.046.036.550,00	100	10.888.449.132,00	100	10.888.449.132,00	100	54.945.740.318,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	88	1056	11.252.207.325,00	1056	10.868.198.179,00	1056	11.044.836.550,00	1056	10.887.249.132,00	1056	10.887.249.132,00	5280	54.939.740.318,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	-	4	1.200.000,00	4	1.200.000,00	4	1.200.000,00	4	1.200.000,00	4	1.200.000,00	20	6.000.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik	Terpenuhinya pelayanan administrasi	Persentase pelayanan administrasi	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah	100	100	1.650.000,00	100	2.650.000,00	100	2.650.000,00	100	2.650.000,00	100	2.650.000,00	100	12.250.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan,

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	pelayanan penatausahaan barang	Perangkat Daerah sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan															dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBMD, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	-	4	1.650.000,00	4	2.650.000,00	4	2.650.000,00	4	2.650.000,00	4	2.650.000,00	20	12.250.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah memuat laporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah yang harus disediakan	100	100	550.000,00	100	6.600.000,00	100	6.600.000,00	100	6.600.000,00	100	6.600.000,00	100	26.950.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah memuat penyusunan pendataan, pemungutan, dan penyusunan laporan realisasi retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	-	1	550.000,00	1	6.600.000,00	1	6.600.000,00	1	6.600.000,00	1	6.600.000,00	5	26.950.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	79.222.500,00	100	79.222.500,00	100	79.222.500,00	100	79.222.500,00	100	79.222.500,00	100	396.112.500,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Program dan Kepegawaian

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP																
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	30	30	50.035.500,00	30	50.035.500,00	30	50.035.500,00	30	50.035.500,00	30	50.035.500,00	150	250.177.500,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Program dan Kepegawaian
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	60	60	29.187.000,00	60	29.187.000,00	60	29.187.000,00	60	29.187.000,00	60	29.187.000,00	300	145.935.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Program dan Kepegawaian
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	217.955.400,00	100	217.955.400,00	100	217.955.400,00	100	217.955.400,00	100	217.955.400,00	100	1.089.777.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	4.837.000,00	1	4.837.000,00	1	4.837.000,00	1	4.837.000,00	1	4.837.000,00	5	24.185.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	23.094.400,00	4	23.094.400,00	4	23.094.400,00	4	23.094.400,00	4	23.094.400,00	20	115.472.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perlengkapan Kantor		Kantor yang Disediakan	dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	yang Disediakan pada tahun berjalan															Penatausahaan Barang
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	5	5	13.864.400,00	5	13.864.400,00	5	13.864.400,00	5	13.864.400,00	5	13.864.400,00	25	69.322.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	55.185.900,00	12	55.185.900,00	12	55.185.900,00	12	55.185.900,00	12	55.185.900,00	60	275.929.500,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	17.594.200,00	1	17.594.200,00	1	17.594.200,00	1	17.594.200,00	1	17.594.200,00	5	87.971.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	60	13.770.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	12	12	99.995.200,00	12	99.995.200,00	12	99.995.200,00	12	99.995.200,00	12	99.995.200,00	60	499.976.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	5	3.151.500,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah																Penatausahaan Barang
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ---------- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	721.191.275,00	100	811.191.275,00	100	811.191.275,00	100	811.191.275,00	100	811.191.275,00	100	3.965.956.375,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	71	71	221.364.275,00	71	221.364.275,00	71	221.364.275,00	71	221.364.275,00	71	221.364.275,00	355	1.106.821.375,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	15	15	99.827.000,00	5	139.827.000,00	5	139.827.000,00	5	139.827.000,00	5	139.827.000,00	35	659.135.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan mencakup ruangan dalam gedung kantor termasuk jaringan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	5	2.200.000.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			internet, listrik, telepon serta sarana dan prasarana luar gedung kantor yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD																
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	1.210.983.100,00	100	1.210.983.100,00	100	1.210.983.100,00	100	1.176.048.115,00	100	1.176.048.115,00	100	5.985.045.530,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	36	36	72.713.500,00	36	72.713.500,00	36	72.713.500,00	36	72.713.500,00	36	72.713.500,00	180	363.567.500,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	36	36	1.138.269.600,00	36	1.138.269.600,00	36	1.138.269.600,00	36	1.103.334.615,00	36	1.103.334.615,00	180	5.621.478.030,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ---------- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	597.009.900,00	100	602.709.900,00	100	602.709.900,00	100	602.709.900,00	100	802.383.120,00	100	3.207.522.720,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD																
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	-	1	46.557.500,00	1	46.557.500,00	1	46.557.500,00	1	46.557.500,00	1	46.557.500,00	5	232.787.500,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	13	13	61.137.900,00	13	61.137.900,00	13	61.137.900,00	13	61.137.900,00	13	61.137.900,00	65	305.689.500,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	-	1	-	1	5.700.000,00	1	5.700.000,00	1	5.700.000,00	1	165.700.000,00	5	182.800.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	47	47	39.314.500,00	47	39.314.500,00	47	39.314.500,00	47	39.314.500,00	47	78.987.720,00	235	236.245.720,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	1	2	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	6	2.250.000.000,00	Kecamatan Sananwetan	Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Penatausahaan Barang

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMD																
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SP dan SOP Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitasi pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP. Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan kecamatan/kelurahan yang diselesaikan ditingkat kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait dengan sesuai SOP Pengaduan	Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100% Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengaduan	100	100	3.322.514.892,00	100	3.321.926.443,00	100	3.369.240.735,00	100	3.359.480.375,00	100	3.603.393.489,00	100	16.976.555.934,00	Kecamatan Sananwetan	
		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Jumlah yang Masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib membayar persewaan tanah aset berupa lahan pertanian dan juga membayar PBB P-2	Jumlah masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum dibandinf jumlah seluruh masyarakat yang menjadi sasaran kewajiban administrasi tersebut dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	Kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah kelurahan yang memiliki	Jumlah kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya dibanding jumlah	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			poskampling aktif yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	seluruh kelurahan se-Kecamatan dikali 100%															
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitasi Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitasi pembayaran PBB, dan Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	508.223.900,00	100	508.023.900,00	100	516.338.192,00	100	506.577.832,00	100	520.490.946,00	100	2.559.654.770,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
		Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian atau laporan yang berpotensi mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang telah dilakukan tindakan penanganan melalui langkah preventif, represif non-yustisial, atau mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah ganguan trantibum yang ditindaklanjuti dibanding seluruh gangguan trantibum dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah jumlah kelurahan yang dilakukan pengamanan	Jumlah cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan dibanding jumlah seluruh cakupan pengamanan wilayah dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) yang dilaksanakan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat)	-	96	143.534.100,00	96	143.534.100,00	96	150.534.100,00	96	140.773.740,00	96	140.773.740,00	480	719.149.780,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit dalam tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit	-	12	364.689.800,00	12	364.489.800,00	12	365.804.092,00	12	365.804.092,00	12	379.717.206,00	60	1.840.504.990,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan) x 100%	100	100	67.462.400,00	100	67.462.400,00	100	67.462.400,00	100	67.462.400,00	100	67.462.400,00	100	337.312.000,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Pelayanan Umum
		Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	Sarana dan prasarana yang tersedia atau terpelihara merupakan sarana dan prasarana pelayanan baik fisik maupun berupa aplikasi	Jumlah sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara dibanding seluruh sarana dan prasarana yang tersedia / terpelihara dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	4	4	10.143.200,00	4	10.143.200,00	4	10.143.200,00	4	10.143.200,00	4	10.143.200,00	20	50.716.000,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Pelayanan Umum

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Masyarakat di Kecamatan	Masyarakat di Kecamatan	Masyarakat di Kecamatan	memuat SOP, SP, IKM, ISO																
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharaan adalah pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeilharaan atas sistem informasi yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan di bangun	-	12	57.319.200,00	12	57.319.200,00	12	57.319.200,00	12	57.319.200,00	12	57.319.200,00	60	286.596.000,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Pelayanan Umum
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dan di fasilitasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	100	100	16.955.722.748,00	100	15.455.702.725,00	100	15.810.279.970,00	100	15.520.040.330,00	100	15.985.179.940,00	100	79.726.925.713,00	Kecamatan Sananwetan	
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100				
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses	jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	7	7		7		7		7		7		7			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.																
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir adalah perbandingan antara jumlah usulan masyarakat yang dimasukkan ke dalam pembahasan rencana/program kegiatan pemerintah dengan jumlah seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum perencanaan terendah	Jumlah usulan masyarakat yang masuk dalam rencana / program kegiatan pemerintah dibagi seluruh usulan masyarakat	100	100	2.893.757.448,00	100	1.393.757.448,00	100	1.598.334.693,00	100	1.626.095.053,00	100	1.626.234.663,00	100	9.138.179.305,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan misal pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibanding dengan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	14	14	56.144.848,00	14	56.144.848,00	14	56.144.848,00	14	56.144.848,00	14	56.144.848,00	70	280.724.240,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	7	7	2.245.000.000,00	7	745.000.000,00		949.577.245,00	7	977.337.605,00	7	977.337.605,00	28	5.894.252.455,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	peserta pelatihan adalah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	Jumlah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	7	7	592.612.600,00	7	592.612.600,00	7	592.612.600,00	7	592.612.600,00	7	592.752.210,00	35	2.963.202.610,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	410.637.550,00	100	410.637.550,00	100	410.637.550,00	100	410.637.550,00	100	410.637.550,00	100	2.053.187.750,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	4	4	321.873.800,00	4	321.873.800,00	4	321.873.800,00	4	321.873.800,00	4	321.873.800,00	20	1.609.369.000,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peserta Pameran/bazar disini adalah peserta yang difasilitasi tidak termasuk tenant yang tidak difasilitasi	Jumlah peserta pameran/ bazar ekonomi masyarakat pada tahun berjalan	1	1	88.763.750,00	1	88.763.750,00	1	88.763.750,00	1	88.763.750,00	1	88.763.750,00	5	443.818.750,00	Kecamatan Sananwetan	Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Kelurahan Gedog																			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standart adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standart Pelayanan yang telah Ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standart / ketentuan yang berlaku .....x100 % Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan x 100%	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Gedog	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	6.600.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang	10	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	45	6.600.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	tersusun pada tahun berjalan															
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar --- --- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	8.250.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	4	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	20	8.250.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar --- 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	22.763.400,00	100	22.763.400,00	100	22.763.400,00	100	22.763.400,00	100	22.763.400,00	100	113.817.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	1	6.630.000,00	1	6.630.000,00	1	6.630.000,00	1	6.630.000,00	1	6.630.000,00	5	33.150.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	65	26	16.133.400,00	26	16.133.400,00	26	16.133.400,00	26	16.133.400,00	26	16.133.400,00	130	80.667.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	49.500.800,00	100	49.500.800,00	100	49.500.850,00	100	49.500.850,00	100	49.500.850,00	100	247.504.150,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	3.935.000,00	1	3.935.000,00	1	3.935.000,00	1	3.935.000,00	1	3.935.000,00	5	19.675.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	15	60.000.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran																
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	6	6	9.999.600,00	6	9.999.600,00	6	9.999.650,00	6	9.999.650,00	6	9.999.650,00	30	49.998.150,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	4	10	15.218.400,00	10	15.218.400,00	10	15.218.400,00	10	15.218.400,00	10	15.218.400.000,00	50	15.279.273.600,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	4.963.500,00	1	4.963.500,00	1	4.963.500,00	1	4.963.500,00	1	4.963.500,00	5	24.817.500,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	60	13.770.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	5	3.151.500,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ---------- x	100	100	100.501.400,00	100	100.501.400,00	100	95.451.400,00	100	95.451.400,00	100	95.451.400,00	100	487.357.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penunjang urusan	Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan															
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	1	20	22.242.500,00	1	22.242.500,00	1	17.242.500,00	1	17.242.500,00	1	17.242.500,00	24	96.212.500,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	1	7	78.258.900,00	1	78.258.900,00	1	78.208.900,00	1	78.208.900,00	1	78.208.900,00	11	391.144.500,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	28.488.000,00	100	28.488.000,00	100	28.488.000,00	100	28.488.000,00	100	28.488.000,00	100	142.440.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	36	24	26.652.000,00	24	26.652.000,00	24	26.652.000,00	24	26.652.000,00	24	26.652.000,00	120	133.260.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		yang Disediakan	menunjang kegiatan perkantoran																
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	60	9.180.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ---------- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	18.051.700,00	100	18.051.700,00	100	17.551.700,00	100	17.551.700,00	100	37.551.700,00	100	108.758.500,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	7	7	6.137.200,00	7	6.137.200,00	7	6.137.200,00	7	6.137.200,00	7	6.137.200,00	35	30.686.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	5	5	7.914.500,00	5	7.914.500,00	5	7.914.500,00	5	7.914.500,00	5	17.914.500,00	25	49.572.500,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	13.500.000,00	5	28.500.000,00	Kelurahan Gedog	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMD	Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan															
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	**Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SP dan SOP** **Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitasi pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP.** **Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan kecamatan/kelurahan yang diselesaikan ditingkat kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait dengan sesuai SOP Pengaduan**	**Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan** **Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100%** **Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengaduan**	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Sananwetan	
		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Jumlah yang Masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib	Jumlah masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum dibandinf jumlah seluruh masyarakat yang menjadi sasaran	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			membayar persewaan tanah aset berupa lahan pertanian dan juga membayar PBB P-2	kewajiban administrasi tersebut dikali 100%															
		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	Kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah kelurahan yang memiliki poskampling aktif yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	Jumlah kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya dibanding jumlah seluruh kelurahan se-Kecamatan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitasi Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitasi pembayaran PBB, dan Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	455.756.600,00	100	455.556.600,00	100	458.556.600,00	100	458.556.600,00	100	478.556.600,00	100	2.306.983.000,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
		Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian atau laporan yang berpotensi mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang telah dilakukan tindakan penanganan melalui langkah preventif, represif non-yustisial, atau mediasi sesuai ketentuan peraturan	Jumlah ganguan trantibum yang ditindaklanjuti dibanding seluruh gangguan trantibum dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			perundang-undangan.																
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah jumlah kelurahan yang dilakukan pengamanan	Jumlah cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan dibanding jumlah seluruh cakupan pengamanan wilayah dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) yang dilaksanakan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat)	-	12	43.006.600,00	12	43.006.600,00	12	46.006.600,00	12	46.006.600,00	12	66.006.600,00	60	244.033.000,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit dalam tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit	-	12	412.750.000,00	12	412.550.000,00	12	412.550.000,00	12	412.550.000,00	12	412.550.000,00	60	2.062.950.000,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan) x 100%	100	100	72.727.000,00	100	72.727.000,00	100	72.727.000,00	100	72.727.000,00	100	72.727.000,00	100	363.635.000,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
		Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	Sarana dan prasarana yang tersedia atau terpelihara merupakan sarana dan prasarana pelayanan baik fisik	Jumlah sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara dibanding seluruh sarana dan prasarana yang tersedia / terpelihara dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			maupun berupa aplikasi																
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	1	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	10	13.199.000,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharan adalah pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeilharaan atas sistem informasi yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan di bangun	-	12	70.087.200,00	12	70.087.200,00	12	70.087.200,00	12	70.087.200,00	12	70.087.200,00	60	350.436.000,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dan di fasilitasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Gedog	
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.	jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	7	7		7		7		7		7		7			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir adalah perbandingan antara jumlah usulan masyarakat yang dimasukkan ke dalam pembahasan rencana/program kegiatan pemerintah dengan jumlah seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum perencanaan terendah	Jumlah usulan masyarakat yang masuk dalam rencana / program kegiatan pemerintah dibagi seluruh usulan masyarakat	100	100	2.601.345.000,00	100	2.601.345.000,00	100	2.601.345.000,00	100	2.433.345.000,00	100	2.433.345.000,00	100	12.670.725.000,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan misal pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibanding dengan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	15	14	43.079.800,00	14	43.079.800,00	14	43.079.800,00	14	43.079.800,00	14	43.079.800,00	70	215.399.000,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	17	59	1.918.000.000,00	15	1.918.000.000,00	15	1.918.000.000,00	15	1.750.000.000,00	15	1.750.000.000,00	119	9.254.000.000,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	peserta pelatihan adalah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	Jumlah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	17	6	640.265.200,00	6	640.265.200,00	6	640.265.200,00	6	640.265.200,00	6	640.265.200,00	30	3.201.326.000,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	73.877.900,00	100	73.877.900,00	100	73.877.900,00	100	73.877.900,00	100	73.877.900,00	100	369.389.500,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	4	4	65.355.900,00	4	65.355.900,00	4	65.355.900,00	4	65.355.900,00	4	65.355.900,00	20	326.779.500,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peserta Pameran/bazar disini adalah peserta yang difasilitasi tidak termasuk tenant yang tidak difasilitasi	Jumlah peserta pameran/ bazar ekonomi masyarakat pada tahun berjalan	1	1	8.522.000,00	1	8.522.000,00	1	8.522.000,00	1	8.522.000,00	1	8.522.000,00	5	42.610.000,00	Kelurahan Gedog	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
Kelurahan Plosokerep																			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standart adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standart Pelayanan yang telah Ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standart / ketentuan yang berlaku .....x100 % Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan x 100%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Sananwetan	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ---------- x	100	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	6.600.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perangkat Daerah	kinerja Perangkat Daerah	waktu dan sesuai standar	perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun															
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	9	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	45	6.600.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar --- --- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	8.250.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	4	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	20	8.250.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar --- --- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	24.258.600,00	100	24.258.600,00	100	24.258.600,00	100	24.258.600,00	100	24.258.600,00	100	121.293.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP																
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	1	8.160.000,00	1	8.160.000,00	1	8.160.000,00	1	8.160.000,00	1	8.160.000,00	5	40.800.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	36	30	16.098.600,00	30	16.098.600,00	30	16.098.600,00	30	16.098.600,00	30	16.098.600,00	150	80.493.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	49.808.000,00	100	49.808.000,00	100	49.808.000,00	100	49.808.000,00	100	49.808.000,00	100	249.040.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	5	20.000.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			menunjang kegiatan perkantoran																
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	15	60.000.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	6	5	8.847.800,00	5	8.847.800,00	5	8.847.800,00	5	8.847.800,00	5	8.847.800,00	25	44.239.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	7	10	15.440.000,00	10	15.440.000,00	10	15.440.000,00	10	15.440.000,00	10	15.440.000,00	50	77.200.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	6.135.900,00	1	6.135.900,00	1	6.135.900,00	1	6.135.900,00	1	6.135.900,00	5	30.679.500,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	60	13.770.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	-	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	5	3.151.500,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah																
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ---------- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	121.703.100,00	100	121.703.100,00	100	105.303.100,00	100	105.303.100,00	100	105.303.100,00	100	559.315.500,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	-	9	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	34.600.000,00	1	34.600.000,00	1	34.600.000,00	13	203.800.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	-	37	71.703.100,00	1	71.703.100,00	1	70.703.100,00	1	70.703.100,00	1	70.703.100,00	41	355.515.500,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	37.600.000,00	100	37.600.000,00	100	37.600.000,00	100	37.600.000,00	100	37.600.000,00	100	188.000.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP																
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	36	36	35.800.000,00	36	35.800.000,00	36	35.800.000,00	36	35.800.000,00	36	35.800.000,00	180	179.000.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	60	9.000.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ---------- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	24.593.800,00	100	24.593.800,00	100	27.593.800,00	100	27.593.800,00	100	37.593.800,00	100	141.969.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	7	6	6.593.200,00	6	6.593.200,00	6	6.593.200,00	6	6.593.200,00	6	6.593.200,00	30	32.966.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0006 -	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	Peralatan dan mesin lainnya yang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	30	5	18.000.600,00	5	18.000.600,00	5	18.000.600,00	5	18.000.600,00	5	18.000.600,00	25	90.003.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara	dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Dipelihara pada tahun berjalan															
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	-	-	-	-	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	13.000.000,00	3	19.000.000,00	Kelurahan Plosokerep	Sekretaris Kelurahan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	**Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SP dan SOP** **Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitasi pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP.** **Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan kecamatan/kelurahan yang diselesaikan ditingkat kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait**	**Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan** **Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100%** **Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengaduan**	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Sananwetan	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			dengan sesuai SOP Pengaduan																
		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Jumlah yang Masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib membayar persewaan tanah aset berupa lahan pertanian dan juga membayar PBB P-2	Jumlah masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum dibandinf jumlah seluruh masyarakat yang menjadi sasaran kewajiban administrasi tersebut dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	Kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah kelurahan yang memiliki poskampling aktif yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	Jumlah kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya dibanding jumlah seluruh kelurahan se-Kecamatan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitasi Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitasi pembayaran PBB, dan Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	239.513.400,00	100	239.513.400,00	100	260.513.400,00	100	260.513.400,00	100	290.513.400,00	100	1.290.567.000,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
		Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian atau laporan yang berpotensi mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan	Jumlah ganguan trantibum yang ditindaklanjuti dibanding seluruh gangguan trantibum dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			masyarakat (trantibumlinmas) yang telah dilakukan tindakan penanganan melalui langkah preventif, represif non-yustisial, atau mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.																
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah jumlah kelurahan yang dilakukan pengamanan	Jumlah cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan dibanding jumlah seluruh cakupan pengamanan wilayah dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) yang dilaksanakan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat)	-	12	44.596.600,00	12	44.596.600,00	12	45.596.600,00	12	45.596.600,00	12	45.596.600,00	60	225.983.000,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit dalam tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit	-	12	194.916.800,00	12	194.916.800,00	12	214.916.800,00	12	214.916.800,00	12	244.916.800,00	60	1.064.584.000,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan) x 100%	100	100	32.778.700,00	100	32.778.700,00	100	32.778.700,00	100	32.778.700,00	100	32.778.700,00	100	163.893.500,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemerintahan dan Trantibum

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.																
		Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	Sarana dan prasarana yang tersedia atau terpelihara merupakan sarana dan prasarana pelayanan baik fisik maupun berupa aplikasi	Jumlah sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara dibanding seluruh sarana dan prasarana yang tersedia / terpelihara dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	1	2	2.294.000,00	2	2.294.000,00	2	2.294.000,00	2	2.294.000,00	2	2.294.000,00	10	11.470.000,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharan adalah pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeilharaan atas sistem informasi yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan di bangun	1	12	30.484.700,00	12	30.484.700,00	12	30.484.700,00	12	30.484.700,00	12	30.484.700,00	60	152.423.500,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dan di fasilitasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			Kecamatan Sananwetan	
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018																
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.	jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	7	7		7		7		7		7		7			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir adalah perbandingan antara jumlah usulan masyarakat yang dimasukkan ke dalam pembahasan rencana/program kegiatan pemerintah dengan jumlah seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum perencanaan terendah	Jumlah usulan masyarakat yang masuk dalam rencana / program kegiatan pemerintah dibagi seluruh usulan masyarakat	100	100	1.215.901.300,00	100	1.215.901.300,00	100	1.315.901.300,00	100	1.715.901.300,00	100	1.745.901.300,00	100	7.209.506.500,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan misal pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibanding dengan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dikali 100%	100	100		100		100		100		100	100,00	100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	45	14	22.351.300,00	14	22.351.300,00	14	22.351.300,00	14	22.351.300,00	14	42.351.300,00	70	131.756.500,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	-	7	705.000.000,00	7	705.000.000,00	7	805.000.000,00	7	1.205.000.000,00	7	1.215.000.000,00	35	4.635.000.000,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	peserta pelatihan adalah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	Jumlah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	47		488.550.000,00	6	488.550.000,00	6	488.550.000,00	6	488.550.000,00	6	488.550.000,00	24	2.442.750.000,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	65.955.400,00	100	65.955.400,00	100	65.955.400,00	100	65.955.400,00	100	65.955.400,00	100	329.777.000,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	7	4	58.150.650,00	4	58.150.650,00	4	58.150.650,00	4	58.150.650,00	4	58.150.650,00	20	290.753.250,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peserta Pameran/bazar disini adalah peserta yang difasilitasi tidak termasuk tenant yang tidak difasilitasi	Jumlah peserta pameran/ bazar ekonomi masyarakat pada tahun berjalan	1	1	7.804.750,00	1	7.804.750,00	1	7.804.750,00	1	7.804.750,00	1	7.804.750,00	5	39.023.750,00	Kelurahan Plosokerep	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
Kelurahan Klampok																			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar	Layanan kedinasan sesuai standart adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standart / ketentuan yang berlaku .....x100 % Jumlah	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Klampok	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
KABUPATEN/KOTA		/ ketentuan yang berlaku	layanan berdasarkan Standart Pelayanan yang telah Ditetapkan	fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan x 100%															
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	6.600.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	9	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	45	6.600.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	8.250.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	4	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	20	8.250.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05 - Administrasi	Terpenuhinya pelayanan	Persentase pelayanan	Ketersediaan administrasi umum	Jumlah jenis administrasi	100	100	24.199.400,00	100	24.199.400,00	100	24.199.400,00	100	24.199.400,00	100	24.199.400,00	100	120.997.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan															
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	1	8.160.000,00	1	8.160.000,00	1	8.160.000,00	1	8.160.000,00	1	8.160.000,00	5	40.800.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	28	28	16.039.400,00	28	16.039.400,00	28	16.039.400,00	28	16.039.400,00	28	16.039.400,00	140	80.197.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	48.100.900,00	100	48.100.900,00	100	48.100.900,00	100	48.100.900,00	100	48.100.900,00	100	240.504.500,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	3.964.800,00	1	3.964.800,00	1	3.964.800,00	1	3.964.800,00	1	3.964.800,00	5	19.824.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	11.924.000,00	3	11.924.000,00	3	11.924.000,00	3	11.924.000,00	3	11.924.000,00	15	59.620.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	9.125.000,00	3	9.125.000,00	3	9.125.000,00	3	9.125.000,00	3	9.125.000,00	15	45.625.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	10	10	15.077.600,00	10	15.077.600,00	10	15.077.600,00	10	15.077.600,00	10	15.077.600,00	50	75.388.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	4.625.200,00	1	4.625.200,00	1	4.625.200,00	1	4.625.200,00	1	4.625.200,00	5	23.126.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	60	13.770.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			menunjang kegiatan perkantoran																
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	-	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	5	3.151.500,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ---------- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	87.798.700,00	100	87.798.700,00	100	87.798.700,00	100	87.798.700,00	100	87.798.700,00	100	438.993.500,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	-	20	16.282.000,00	20	16.282.000,00	20	16.282.000,00	20	16.282.000,00	20	16.282.000,00	100	81.410.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	2	6	71.516.700,00	1	71.516.700,00	1	71.516.700,00	1	71.516.700,00	1	71.516.700,00	10	357.583.500,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	26.378.250,00	100	26.378.250,00	100	26.378.250,00	100	26.378.250,00	100	26.378.250,00	100	131.891.250,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	24	24	24.542.250,00	24	24.542.250,00	24	24.542.250,00	24	24.542.250,00	24	24.542.250,00	120	122.711.250,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	60	9.180.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ---------- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	20.350.700,00	100	20.350.700,00	100	23.050.700,00	100	23.050.700,00	100	33.050.700,00	100	119.853.500,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	7	7	10.523.500,00	7	10.523.500,00	7	10.523.500,00	7	10.523.500,00	7	10.523.500,00	35	52.617.500,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan															
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	6	6	9.827.200,00	6	9.827.200,00	6	9.827.200,00	6	9.827.200,00	6	9.827.200,00	30	49.136.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	-	-	-	-	-	1	2.700.000,00	1	2.700.000,00	1	12.700.000,00	3	18.100.000,00	Kelurahan Klampok	Sekretaris Kelurahan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	**Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SP dan SOP** **Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitasi pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP.** **Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan**	**Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan** **Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100%** **Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengaduan**	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Klampok	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			kecamatan/kelurahan yang diselesaikan ditingkat kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait dengan sesuai SOP Pengaduan																
		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Jumlah yang Masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib membayar persewaan tanah aset berupa lahan pertanian dan juga membayar PBB P-2	Jumlah masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum dibandinf jumlah seluruh masyarakat yang menjadi sasaran kewajiban administrasi tersebut dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	Kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah kelurahan yang memiliki poskampling aktif yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	Jumlah kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya dibanding jumlah seluruh kelurahan se-Kecamatan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitasi Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitasi pembayaran PBB, dan Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	253.718.000,00	100	253.718.000,00	100	254.718.000,00	100	254.718.000,00	100	294.718.000,00	100	1.311.590.000,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
		Persentase ganguan	Gangguan ketenteraman dan	Jumlah ganguan trantibum yang	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		trantibum yang ditindaklanjuti	ketertiban umum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian atau laporan yang berpotensi mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang telah dilakukan tindakan penanganan melalui langkah preventif, represif non-yustisial, atau mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	ditindaklanjuti dibanding seluruh gangguan trantibum dikalikan 100%																
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah jumlah kelurahan yang dilakukan pengamanan	Jumlah cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan dibanding jumlah seluruh cakupan pengamanan wilayah dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) yang dilaksanakan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat)	-	12	42.514.600,00	12	42.514.600,00	12	43.514.600,00	12	43.514.600,00	12	43.514.600,00	60	215.573.000,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit dalam tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit	-	12	211.203.400,00	12	211.203.400,00	12	211.203.400,00	12	211.203.400,00	12	251.203.400,00	60	1.096.017.000,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi	Persentase kegiatan pelayanan dan	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang	(Jumlah kegiatan pelayanan dan pengananan pengaduan	100	100	36.296.600,00	100	36.296.600,00	100	36.296.600,00	100	36.296.600,00	100	36.296.600,00	100	181.483.000,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemerintah

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	pelayanan publik di tingkat kecamatan	penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan) x 100%															an dan Trantibum
		Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	Sarana dan prasarana yang tersedia atau terpelihara merupakan sarana dan prasarana pelayanan baik fisik maupun berupa aplikasi	Jumlah sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara dibanding seluruh sarana dan prasarana yang tersedia / terpelihara dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	2	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	10	13.199.000,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharan adalah pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeilharaan atas sistem informasi yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan di bangun	-	12	33.656.800,00	12	33.656.800,00	12	33.656.800,00	12	33.656.800,00	12	33.656.800,00	60	168.284.000,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung	lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dan di fasilitasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Klampok	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		pencapaian SPM																	
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.	jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	7	7		7		7		7		7		7			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	100	100	1.321.220.800,00	100	1.321.220.800,00	100	1.321.220.800,00	100	1.321.220.800,00	100	1.501.220.800,00	100	5.464.883.300,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan			100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	14	14	24.709.400,00	14	24.709.400,00	14	24.709.400,00	14	24.709.400,00	14	24.709.400,00	70	123.547.000,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	-	8	1.130.000.000,00	8	1.130.000.000,00	8	1.130.000.000,00	8	1.130.000.000,00	8	1.180.000.000,00	40	5.700.000.000,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	peserta pelatihan adalah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	Jumlah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	6	6	166.511.400,00	6	166.511.400,00	6	166.511.400,00	6	166.511.400,00	6	296.511.400,00	30	962.557.000,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	66.268.650,00	100	66.268.650,00	100	66.268.650,00	100	66.268.650,00	100	66.268.650,00	100	331.343.250,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	4	4	57.632.650,00	4	57.632.650,00	4	57.632.650,00	4	57.632.650,00	4	57.632.650,00	20	288.163.250,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peserta Pameran/bazar disini adalah peserta yang difasilitasi tidak termasuk tenant yang tidak difasilitasi	Jumlah peserta pameran/ bazar ekonomi masyarakat pada tahun berjalan	1	1	8.636.000,00	1	8.636.000,00	1	8.636.000,00	1	8.636.000,00	1	8.636.000,00	5	43.180.000,00	Kelurahan Klampok	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
Kelurahan Sananwetan																			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standart adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standart Pelayanan yang telah Ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standart / ketentuan yang berlaku .....x100 % Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan x 100%	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Sananwetan	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ---------- x	100	100	1.426.000,00	100	1.426.000,00	100	1.426.000,00	100	1.426.000,00	100	1.426.000,00	100	7.130.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perangkat Daerah	kinerja Perangkat Daerah	waktu dan sesuai standar	perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun															
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	9	9	1.426.000,00	9	1.426.000,00	9	1.426.000,00	9	1.426.000,00	9	1.426.000,00	45	7.130.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	1.544.000,00	100	1.544.000,00	100	1.544.000,00	100	1.544.000,00	100	1.544.000,00	100	7.720.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	4	4	1.544.000,00	4	1.544.000,00	4	1.544.000,00	4	1.544.000,00	4	1.544.000,00	20	7.720.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	23.273.400,00	100	23.273.400,00	100	23.273.400,00	100	23.273.400,00	100	23.273.400,00	100	116.367.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP																
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	1	7.140.000,00	1	7.140.000,00	1	7.140.000,00	1	7.140.000,00	1	7.140.000,00	5	35.700.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	28	28	16.133.400,00	28	16.133.400,00	28	16.133.400,00	28	16.133.400,00	28	16.133.400,00	140	80.667.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	50.806.288,00	100	50.806.288,00	100	50.806.288,00	100	50.806.288,00	100	50.806.288,00	100	254.031.440,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	5	20.000.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			menunjang kegiatan perkantoran																
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	15	60.000.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	15	50.000.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	10	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	50	75.000.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	6.421.988,00	1	6.421.988,00	1	6.421.988,00	1	6.421.988,00	1	6.421.988,00	5	32.109.940,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	60	13.770.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	5	3.151.500,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah																
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ---------- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	85.151.720,00	100	85.151.720,00	100	84.951.720,00	100	84.951.720,00	100	94.951.720,00	100	435.158.600,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	-	1	5.814.000,00	1	5.814.000,00	1	5.814.000,00	1	5.814.000,00	1	5.814.000,00	5	29.070.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	-	7	79.337.720,00	7	79.337.720,00	7	79.137.720,00	7	79.137.720,00	7	89.137.720,00	35	406.088.600,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	37.634.700,00	100	37.634.700,00	100	37.634.700,00	100	37.634.700,00	100	37.634.700,00	100	188.173.500,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP																
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	36	36	35.798.700,00	36	35.798.700,00	36	35.798.700,00	36	35.798.700,00	36	35.798.700,00	180	178.993.500,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	12	1.836.000,00	60	9.180.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ---------- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	15.395.700,00	100	15.395.700,00	100	18.895.700,00	100	18.895.700,00	100	38.895.700,00	100	107.478.500,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	-	1	7.486.000,00	1	7.486.000,00	1	7.486.000,00	1	7.486.000,00	1	7.486.000,00	5	37.430.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0006 -	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	Peralatan dan mesin lainnya yang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	7	7	7.909.700,00	7	7.909.700,00	7	7.909.700,00	7	7.909.700,00	7	17.909.700,00	35	49.548.500,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara	dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Dipelihara pada tahun berjalan															
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	-	-	-	-	-	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	13.500.000,00	3	20.500.000,00	Kelurahan Sananwetan	Sekretaris Kelurahan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	**Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SP dan SOP** **Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitasi pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP.** **Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan kecamatan/kelurahan yang diselesaikan ditingkat kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait**	**Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan** **Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100%** **Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengaduan**	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Sananwetan	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			dengan sesuai SOP Pengaduan																
		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Jumlah yang Masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib membayar persewaan tanah aset berupa lahan pertanian dan juga membayar PBB P-2	Jumlah masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum dibandinf jumlah seluruh masyarakat yang menjadi sasaran kewajiban administrasi tersebut dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	Kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah kelurahan yang memiliki poskampling aktif yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	Jumlah kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya dibanding jumlah seluruh kelurahan se-Kecamatan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitasi Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitasi pembayaran PBB, dan Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	559.124.892,00	100	558.936.443,00	100	561.936.443,00	100	561.936.443,00	100	641.936.443,00	100	2.883.870.664,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
		Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian atau laporan yang berpotensi mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan	Jumlah ganguan trantibum yang ditindaklanjuti dibanding seluruh gangguan trantibum dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			masyarakat (trantibumlinmas) yang telah dilakukan tindakan penanganan melalui langkah preventif, represif non-yustisial, atau mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.																
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah jumlah kelurahan yang dilakukan pengamanan	Jumlah cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan dibanding jumlah seluruh cakupan pengamanan wilayah dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) yang dilaksanakan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat)	-	12	47.946.600,00	12	47.946.600,00	12	50.946.600,00	12	50.946.600,00	12	60.946.600,00	60	258.733.000,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit dalam tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit	1	12	511.178.292,00	12	510.989.843,00	12	510.989.843,00	12	510.989.843,00	12	580.989.843,00	60	2.625.137.664,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan) x 100%	100	100	72.599.000,00	100	72.599.000,00	100	72.599.000,00	100	72.599.000,00	100	72.599.000,00	100	362.995.000,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemerintahan dan Trantibum

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.																
		Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	Sarana dan prasarana yang tersedia atau terpelihara merupakan sarana dan prasarana pelayanan baik fisik maupun berupa aplikasi	Jumlah sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara dibanding seluruh sarana dan prasarana yang tersedia / terpelihara dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	2	2	2.670.000,00	2	2.670.000,00	2	2.670.000,00	2	2.670.000,00	2	2.670.000,00	10	13.350.000,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharan adalah pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeilharaan atas sistem informasi yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan di bangun	1	12	69.929.000,00	12	69.929.000,00	12	69.929.000,00	12	69.929.000,00	12	69.929.000,00	60	349.645.000,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dan di fasilitasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Sananwetan	
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018																
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.	jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	7	7		7		7		7		7		7			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir adalah perbandingan antara jumlah usulan masyarakat yang dimasukkan ke dalam pembahasan rencana/program kegiatan pemerintah dengan jumlah seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum perencanaan terendah	Jumlah usulan masyarakat yang masuk dalam rencana / program kegiatan pemerintah dibagi seluruh usulan masyarakat	100	100	3.099.871.500,00	100	3.099.851.477,00	100	3.099.851.477,00	100	2.899.851.477,00	100	2.899.851.477,00	100	15.099.277.408,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan misal pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibanding dengan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	14	14	49.856.400,00	14	49.856.400,00	14	49.856.400,00	14	49.856.400,00		49.856.400,00	56	249.282.000,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	17	17	2.240.000.000,00	17	2.240.000.000,00	17	2.240.000.000,00	17	2.040.000.000,00	17	2.040.000.000,00	85	10.800.000.000,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	peserta pelatihan adalah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	Jumlah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	6	6	810.015.100,00	6	809.995.077,00	6	809.995.077,00	6	809.995.077,00	6	809.995.077,00	30	4.049.995.408,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	77.679.200,00	100	77.679.200,00	100	77.679.200,00	100	77.679.200,00	100	77.679.200,00	100	388.396.000,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	4	4	69.157.200,00	4	69.157.200,00	4	69.157.200,00	4	69.157.200,00	4	69.157.200,00	20	345.786.000,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peserta Pameran/bazar disini adalah peserta yang difasilitasi tidak termasuk tenant yang tidak difasilitasi	Jumlah peserta pameran/ bazar ekonomi masyarakat pada tahun berjalan	1	1	8.522.000,00	1	8.522.000,00	1	8.522.000,00	1	8.522.000,00	1	8.522.000,00	5	42.610.000,00	Kelurahan Sananwetan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
Kelurahan Rembang																			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar	Layanan kedinasan sesuai standart adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standart / ketentuan yang berlaku .....x100 % Jumlah	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Rembang	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
KABUPATEN/KOTA		/ ketentuan yang berlaku	layanan berdasarkan Standart Pelayanan yang telah Ditetapkan	fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan x 100%															
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	6.600.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	9	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	45	6.600.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	8.250.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	4	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	20	8.250.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05 - Administrasi	Terpenuhinya pelayanan	Persentase pelayanan	Ketersediaan administrasi umum	Jumlah jenis administrasi	100	100	24.123.400,00	100	24.123.400,00	100	24.123.400,00	100	24.123.400,00	100	24.123.400,00	100	120.617.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan															
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	1	6.630.000,00	1	6.630.000,00	1	6.630.000,00	1	6.630.000,00	1	6.630.000,00	5	33.150.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	48	30	17.493.400,00	30	17.493.400,00	30	17.493.400,00	30	17.493.400,00	30	17.493.400,00	150	87.467.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	49.262.600,00	100	49.262.600,00	100	49.262.600,00	100	49.262.600,00	100	49.262.600,00	100	246.313.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	4.170.000,00	1	4.170.000,00	1	4.170.000,00	1	4.170.000,00	1	4.170.000,00	5	20.850.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	11.997.700,00	3	11.997.700,00	3	11.997.700,00	3	11.997.700,00	3	11.997.700,00	15	59.988.500,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	4	4	9.744.600,00	4	9.744.600,00	4	9.744.600,00	4	9.744.600,00	4	9.744.600,00	20	48.723.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	2	10	15.586.000,00	10	15.586.000,00	10	15.586.000,00	10	15.586.000,00	10	15.586.000,00	50	77.930.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	4.380.000,00	1	4.380.000,00	1	4.380.000,00	1	4.380.000,00	1	4.380.000,00	5	21.900.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	60	13.770.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			menunjang kegiatan perkantoran																
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	-	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	5	3.151.500,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ---------- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	71.093.400,00	100	71.093.400,00	100	77.063.400,00	100	77.063.400,00	100	77.063.400,00	100	373.377.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	-	15	13.612.500,00	1	13.612.500,00	1	13.612.500,00	1	13.612.500,00	1	13.612.500,00	19	68.062.500,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	-	6	57.480.900,00	1	57.480.900,00	1	63.450.900,00	1	63.450.900,00	1	63.450.900,00	10	305.314.500,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	20.700.000,00	100	20.700.000,00	100	20.700.000,00	100	20.700.000,00	100	20.700.000,00	100	103.500.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	36	36	18.900.000,00	36	18.900.000,00	36	18.900.000,00	36	18.900.000,00	36	18.900.000,00	180	94.500.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	60	9.000.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ---------- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	14.758.200,00	100	14.758.200,00	100	17.058.200,00	100	17.058.200,00	100	27.058.200,00	100	90.691.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	7	7	6.779.400,00	7	6.779.400,00	7	6.779.400,00	7	6.779.400,00	7	6.779.400,00	35	33.897.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan															
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	16	5	7.978.800,00	5	7.978.800,00	5	7.978.800,00	5	7.978.800,00	5	7.978.800,00	25	39.894.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	-	-	-	-	-	1	2.300.000,00	1	2.300.000,00	1	12.300.000,00	3	16.900.000,00	Kelurahan Rembang	Sekretaris Kelurahan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SP dan SOP Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitasi pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP. Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan kecamatan/keluraha	Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100% Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengaduan	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Rembang	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			n yang diselesaikan ditingkat kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait dengan sesuai SOP Pengaduan																
		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Jumlah yang Masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib membayar persewaan tanah aset berupa lahan pertanian dan juga membayar PBB P-2	Jumlah masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum dibandinf jumlah seluruh masyarakat yang menjadi sasaran kewajiban administrasi tersebut dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	Kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah kelurahan yang memiliki poskampling aktif yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	Jumlah kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya dibanding jumlah seluruh kelurahan se-Kecamatan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitasi Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitasi pembayaran PBB, dan Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	160.801.000,00	100	160.801.000,00	100	165.801.000,00	100	165.801.000,00	100	225.801.000,00	100	879.005.000,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
		Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Jumlah ganguan trantibum yang ditindaklanjuti dibanding seluruh gangguan	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			adalah setiap kejadian atau laporan yang berpotensi mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang telah dilakukan tindakan penanganan melalui langkah preventif, represif non-yustisial, atau mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	trantibum dikalikan 100%																
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah jumlah kelurahan yang dilakukan pengamanan	Jumlah cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan dibanding jumlah seluruh cakupan pengamanan wilayah dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) yang dilaksanakan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat)	-	12	42.544.600,00	12	42.544.600,00	12	45.544.600,00	12	45.544.600,00	12	45.544.600,00	60	221.723.000,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit dalam tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit	-	12	118.256.400,00	12	118.256.400,00	12	120.256.400,00	12	120.256.400,00	12	180.256.400,00	60	657.282.000,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan	(Jumlah kegiatan pelayanan dan pengananan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah	100	100	27.139.400,00	100	27.139.400,00	100	27.139.400,00	100	27.139.400,00	100	27.139.400,00	100	135.697.000,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemerintahan dan Trantibum

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	tingkat kecamatan	yang ditindaklanjuti	kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	kegiatan pelayanan dan pengananan pengaduan) x 100%															
		Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	Sarana dan prasarana yang tersedia atau terpelihara merupakan sarana dan prasarana pelayanan baik fisik maupun berupa aplikasi	Jumlah sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara dibanding seluruh sarana dan prasarana yang tersedia / terpelihara dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	1	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	2	2.639.800,00	10	13.199.000,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharan adalah pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeilharaan atas sistem informasi yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan di bangun	1	12	24.499.600,00	12	24.499.600,00	12	24.499.600,00	12	24.499.600,00	12	24.499.600,00	60	122.498.000,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dan di fasilitasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			Kelurahan Rembang	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.	jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	7	7		7		7		7		7		7			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir adalah perbandingan antara jumlah usulan masyarakat yang dimasukkan ke dalam pembahasan rencana/program kegiatan pemerintah dengan jumlah seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum perencanaan terendah	Jumlah usulan masyarakat yang masuk dalam rencana / program kegiatan pemerintah dibagi seluruh usulan masyarakat	100	100	783.907.300,00	100	783.907.300,00	100	833.907.300,00	100	833.907.300,00	100	848.907.300,00	100	4.084.536.500,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara kegiatan pemberdayaan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah seluruh kegiatan pemberdayaan	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			masyarakat dalam pembangunan misal pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibanding dengan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat	masyarakat dalam pembangunan dikali 100%															
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	31	14	15.499.700,00	14	15.499.700,00	14	15.499.700,00	14	15.499.700,00	14	25.499.700,00	70	87.498.500,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	-	4	495.000.000,00	4	495.000.000,00	4	545.000.000,00	4	545.000.000,00	4	550.000.000,00	20	2.630.000.000,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	peserta pelatihan adalah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	Jumlah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	31	6	273.407.600,00	6	273.407.600,00	6	273.407.600,00	6	273.407.600,00	6	273.407.600,00	30	1.367.038.000,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	67.566.100,00	100	67.566.100,00	100	67.566.100,00	100	67.566.100,00	100	67.566.100,00	100	337.830.500,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	8	4	59.034.100,00	4	59.034.100,00	4	59.034.100,00	4	59.034.100,00	4	59.034.100,00	20	295.170.500,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peserta Pameran/bazar disini adalah peserta yang difasilitasi tidak termasuk tenant yang tidak difasilitasi	Jumlah peserta pameran/ bazar ekonomi masyarakat pada tahun berjalan	3	1	8.532.000,00	1	8.532.000,00	1	8.532.000,00	1	8.532.000,00	1	8.532.000,00	5	42.660.000,00	Kelurahan Rembang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kelurahan Karang Tengah																			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standart adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standart Pelayanan yang telah Ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standart / ketentuan yang berlaku .....x100 % Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan x 100%	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Karangtengah	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	6.600.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	9	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	45	6.600.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ---------- --- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	8.250.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	5	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	20	8.250.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	23.741.400,00	100	23.741.400,00	100	23.741.400,00	100	23.741.400,00	100	23.741.400,00	100	118.707.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00	5	38.250.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	36	30	16.091.400,00	30	16.091.400,00	30	16.091.400,00	30	16.091.400,00	30	16.091.400,00	150	80.457.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	46.872.500,00	100	46.872.500,00	100	46.872.500,00	100	46.872.500,00	100	46.872.500,00	100	234.362.500,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP																
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	3.017.000,00	1	3.017.000,00	1	3.017.000,00	1	3.017.000,00	1	3.017.000,00	5	15.085.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	15	60.000.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	5	5	8.071.000,00	5	8.071.000,00	5	8.071.000,00	5	8.071.000,00	5	8.071.000,00	25	40.355.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	10	10	15.400.000,00	10	15.400.000,00	10	15.400.000,00	10	15.400.000,00	10	15.400.000,00	50	77.000.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	5.000.200,00	1	5.000.200,00	1	5.000.200,00	1	5.000.200,00	1	5.000.200,00	5	25.001.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan	Tersedianya Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	60	13.770.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	yang Disediakan pada tahun berjalan															
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	5	3.151.500,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ---------- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	90.470.800,00	100	90.470.800,00	100	90.470.800,00	100	90.470.800,00	100	90.470.800,00	100	452.354.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	-	4	3.541.600,00	1	3.541.600,00	1	3.541.600,00	1	3.541.600,00	1	3.541.600,00	8	17.708.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	-	8	86.929.200,00	1	86.929.200,00	1	86.929.200,00	1	86.929.200,00	1	86.929.200,00	12	434.646.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD																
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	22.269.000,00	100	22.269.000,00	100	22.269.000,00	100	22.269.000,00	100	22.269.000,00	100	111.345.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	24	36	20.469.000,00	36	20.469.000,00	36	20.469.000,00	36	20.469.000,00	36	20.469.000,00	180	102.345.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	60	9.000.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ---------- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	27.704.300,00	100	27.704.300,00	100	17.704.300,00	100	17.704.300,00	100	37.704.300,00	100	128.521.500,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			dipelihara sesuai RKPBMD																
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	8	8	6.992.400,00	8	6.992.400,00	8	6.992.400,00	8	6.992.400,00	8	6.992.400,00	40	34.962.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	14	5	8.011.900,00	5	8.011.900,00	5	8.011.900,00	5	8.011.900,00	5	18.011.900,00	25	50.059.500,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	-	1	12.700.000,00	1	12.700.000,00	1	2.700.000,00	1	2.700.000,00	1	12.700.000,00	5	43.500.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Sekretaris Kelurahan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	**Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SP dan SOP** **Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitasi pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP.**	**Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan** **Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100%** **Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar**	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Karangtengah	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan kecamatan/kelurahan yang diselesaikan ditingkat kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait dengan sesuai SOP Pengaduan	**pelayanan = Jumlah pengaduan**																
		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Jumlah yang Masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib membayar persewaan tanah aset berupa lahan pertanian dan juga membayar PBB P-2	Jumlah masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum dibandinf jumlah seluruh masyarakat yang menjadi sasaran kewajiban administrasi tersebut dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	Kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah kelurahan yang memiliki poskampling aktif yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	Jumlah kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya dibanding jumlah seluruh kelurahan se-Kecamatan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitasi Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitasi pembayaran PBB, dan Fasilitasi Koordinasi	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	328.837.600,00	100	328.837.600,00	100	331.837.600,00	100	331.837.600,00	100	331.837.600,00	100	1.653.188.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemerintahan dan Trantibum

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.																
		Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian atau laporan yang berpotensi mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang telah dilakukan tindakan penanganan melalui langkah preventif, represif non-yustisial, atau mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah ganguan trantibum yang ditindaklanjuti dibanding seluruh gangguan trantibum dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah jumlah kelurahan yang dilakukan pengamanan	Jumlah cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan dibanding jumlah seluruh cakupan pengamanan wilayah dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) yang dilaksanakan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat)	-	12	42.396.600,00	12	42.396.600,00	12	45.396.600,00	12	45.396.600,00	12	45.396.600,00	60	220.983.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah,	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit	-	12	286.441.000,00	12	286.441.000,00	12	286.441.000,00	12	286.441.000,00	12	286.441.000,00	60	1.432.205.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemerintahan dan Trantibum

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tingkat Kecamatan		di Tingkat Kecamatan	dan AJB Tanah yang terbit dalam tahun berkenaan																
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan) x 100%	100	100	36.294.000,00	100	36.294.000,00	100	36.294.000,00	100	36.294.000,00	100	36.294.000,00	100	181.470.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
		Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	Sarana dan prasarana yang tersedia atau terpelihara merupakan sarana dan prasarana pelayanan baik fisik maupun berupa aplikasi	Jumlah sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara dibanding seluruh sarana dan prasarana yang tersedia / terpelihara dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	1	2	2.639.000,00	2	2.639.000,00	2	2.639.000,00	2	2.639.000,00	2	2.639.000,00	10	13.195.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharan adalah pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeilharaan atas sistem informasi yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan di bangun	-	12	33.655.000,00	12	33.655.000,00	12	33.655.000,00	12	33.655.000,00	12	33.655.000,00	60	168.275.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan	lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Karangtengah	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
DESA DAN KELURAHAN	dalam pembangunan	masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	kemasyarakatan yang berperan aktif dan di fasilitasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat																
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.	jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	7	7		7		7		7		7		7			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir adalah perbandingan antara jumlah usulan masyarakat yang dimasukkan ke dalam pembahasan rencana/program kegiatan pemerintah dengan jumlah seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum perencanaan terendah	Jumlah usulan masyarakat yang masuk dalam rencana / program kegiatan pemerintah dibagi seluruh usulan masyarakat	100	100	1.778.600.300,00	100	1.778.600.300,00	100	1.778.600.300,00	100	1.778.600.300,00	100	1.778.600.300,00	100	8.893.001.500,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan misal pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibanding dengan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	45	14	31.481.800,00	14	31.481.800,00	14	31.481.800,00	14	31.481.800,00	14	31.481.800,00	70	157.409.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	-	10	1.295.000.000,00	10	1.295.000.000,00	10	1.295.000.000,00	10	1.295.000.000,00	10	1.295.000.000,00	50	6.475.000.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	peserta pelatihan adalah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	Jumlah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	10	6	452.118.500,00	6	452.118.500,00	6	452.118.500,00	6	452.118.500,00	6	452.118.500,00	30	2.260.592.500,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	70.499.000,00	100	70.499.000,00	100	70.499.000,00	100	70.499.000,00	100	70.499.000,00	100	352.495.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	8	4	61.975.000,00	4	61.975.000,00	4	61.975.000,00	4	61.975.000,00	4	61.975.000,00	20	309.875.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kemasyarakatan																			Pembangunan
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peserta Pameran/bazar disini adalah peserta yang difasilitasi tidak termasuk tenant yang tidak difasilitasi	Jumlah peserta pameran/ bazar ekonomi masyarakat pada tahun berjalan	2	1	8.524.000,00	1	8.524.000,00	1	8.524.000,00	1	8.524.000,00	1	8.524.000,00	5	42.620.000,00	Kelurahan Karang Tengah	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
Kelurahan Bendogerit																			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standart adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standart Pelayanan yang telah Ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standart / ketentuan yang berlaku .....x100 % Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan x 100%	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Bendogerit	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	1.320.000,00	100	6.600.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	10	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	9	1.320.000,00	45	6.600.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	1.650.000,00	100	8.250.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			keuangan sesuai standar pelayanan																
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	4	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	4	1.650.000,00	20	8.250.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	23.748.600,00	100	23.748.600,00	100	23.748.600,00	100	23.748.600,00	100	23.748.600,00	100	118.743.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00	1	7.650.000,00	5	38.250.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	36	42	16.098.600,00	42	16.098.600,00	42	16.098.600,00	42	16.098.600,00	42	16.098.600,00	210	80.493.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	45.033.900,00	100	45.033.900,00	100	45.033.900,00	100	45.033.900,00	100	45.033.900,00	100	225.169.500,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00	1	3.935.000,00	13	19.935.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	11.853.000,00	3	11.853.000,00	3	11.853.000,00	3	11.853.000,00	3	11.853.000,00	15	59.265.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	9.811.900,00	3	9.811.900,00	3	9.811.900,00	3	9.811.900,00	3	9.811.900,00	15	49.059.500,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	9	10	10.100.000,00	10	10.100.000,00	10	10.100.000,00	10	10.100.000,00	10	10.100.000,00	50	50.500.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			menunjang kegiatan perkantoran																
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	5.884.700,00	1	5.884.700,00	1	5.884.700,00	1	5.884.700,00	1	5.884.700,00	5	29.423.500,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	60	13.770.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	1	630.300,00	5	3.151.500,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ---------- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	87.048.200,00	100	87.048.200,00	100	77.048.200,00	100	77.048.200,00	100	87.048.200,00	100	415.241.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	-	20	22.687.500,00	1	22.687.500,00	1	12.687.500,00	1	12.687.500,00	1	12.687.500,00	24	83.437.500,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	-	3	64.360.700,00	1	64.360.700,00	1	64.360.700,00	1	64.360.700,00	1	74.360.700,00	7	331.803.500,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ---------- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	43.537.000,00	100	43.537.000,00	100	43.537.000,00	100	43.537.000,00	100	43.537.000,00	100	217.685.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	24	24	41.737.000,00	24	41.737.000,00	24	41.737.000,00		41.737.000,00	24	41.737.000,00	96	208.685.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	60	9.000.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ---------- x	100	100	13.790.800,00	100	13.790.800,00	100	16.490.800,00	100	16.490.800,00	100	36.490.800,00	100	97.054.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan	sesuai kebutuhan	daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD	100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara																
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	7	7	5.790.800,00	7	5.790.800,00	7	5.790.800,00	7	5.790.800,00	7	5.790.800,00	35	28.954.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	21	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	18.000.000,00	25	50.000.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	-	-	-	-	-	1	2.700.000,00	1	2.700.000,00	1	12.700.000,00	3	18.100.000,00	Kelurahan Bendogerit	Sekretaris Kelurahan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan	**Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan**	**Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar**	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Bendogerit	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
N DAN PELAYANAN PUBLIK		sesuai standar pelayanan	**kecamatan/kelurahan sesuai SP dan SOP Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitasi pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP. Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan kecamatan/kelurahan yang diselesaikan ditingkat kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait dengan sesuai SOP Pengaduan**	**pelayanan Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100% Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengaduan**														
		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Jumlah yang Masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib membayar persewaan tanah aset berupa lahan pertanian dan juga membayar PBB P-2	Jumlah masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum dibandinf jumlah seluruh masyarakat yang menjadi sasaran kewajiban administrasi tersebut dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya	Kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah kelurahan yang memiliki poskampling aktif yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	Jumlah kelurahan yang masyarakatanya aktif menjaga trantibum secara swadaya dibanding jumlah seluruh kelurahan se-Kecamatan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitasi Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitasi pembayaran PBB, dan Fasilitasi Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	398.515.400,00	100	398.515.400,00	100	401.515.400,00	100	401.515.400,00	100	401.515.400,00	100	2.001.577.000,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
		Persentase ganguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian atau laporan yang berpotensi mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang telah dilakukan tindakan penanganan melalui langkah preventif, represif non-yustisial, atau mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah ganguan trantibum yang ditindaklanjuti dibanding seluruh gangguan trantibum dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah jumlah kelurahan yang dilakukan pengamanan	Jumlah cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan dibanding jumlah seluruh cakupan pengamanan wilayah dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat)	-	12	43.006.600,00	12	43.006.600,00	12	46.006.600,00	12	46.006.600,00	12	46.006.600,00	60	224.033.000,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemerintahan dan Trantibum

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) yang dilaksanakan																
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit dalam tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah yang terbit	-	12	355.508.800,00	12	355.508.800,00	12	355.508.800,00	12	355.508.800,00	12	355.508.800,00	60	1.777.544.000,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penganan pengaduan) x 100%	100	100	72.727.000,00	100	72.727.000,00	100	72.727.000,00	100	72.727.000,00	100	72.727.000,00	100	363.635.000,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
		Persentase sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara	Sarana dan prasarana yang tersedia atau terpelihara merupakan sarana dan prasarana pelayanan baik fisik maupun berupa aplikasi	Jumlah sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara dibanding seluruh sarana dan prasarana yang tersedia / terpelihara dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	1	4	2.639.800,00	4	2.639.800,00	4	2.639.800,00	4	2.639.800,00	4	2.639.800,00	20	13.199.000,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemerintahan dan Trantibum
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharan adalah	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan di bangun	2	12	70.087.200,00	12	70.087.200,00	12	70.087.200,00	12	70.087.200,00	12	70.087.200,00	60	350.436.000,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemerintahan dan Trantibum

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeilharaan atas sistem informasi yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online																
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dan di fasilitasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100		Kelurahan Bendogerit	
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.	jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	7	7		7		7		7		7		7			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir adalah perbandingan antara jumlah usulan masyarakat yang dimasukkan ke dalam pembahasan rencana/program kegiatan pemerintah dengan jumlah seluruh usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum perencanaan terendah	Jumlah usulan masyarakat yang masuk dalam rencana / program kegiatan pemerintah dibagi seluruh usulan masyarakat	100	100	2.342.834.400,00	100	2.342.834.400,00	100	2.342.834.400,00	100	1.992.834.400,00	100	2.232.834.400,00	100	11.254.172.000,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah perbandingan antara kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan misal pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibanding dengan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	8	14	37.519.200,00	14	37.519.200,00	14	37.519.200,00	14	37.519.200,00	14	37.519.200,00	70	187.596.000,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	-	11	2.250.000.000,00	11	2.250.000.000,00	11	2.250.000.000,00	11	1.900.000.000,00	11	1.840.000.000,00	55	10.490.000.000,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	peserta pelatihan adalah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	Jumlah masyarakat yang hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan	8	6	55.315.200,00	6	55.315.200,00	6	55.315.200,00	6	55.315.200,00	6	355.315.200,00	30	576.576.000,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		Masyarakat di Kelurahan																	Pembangunan
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	85.800.900,00	100	85.800.900,00	100	85.800.900,00	100	85.800.900,00	100	85.800.900,00	100	429.004.500,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	7	4	83.336.100,00	4	83.336.100,00	4	83.336.100,00	4	83.336.100,00	4	83.336.100,00	20	416.680.500,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peserta Pameran/bazar disini adalah peserta yang difasilitasi tidak termasuk tenant yang tidak difasilitasi	Jumlah peserta pameran/ bazar ekonomi masyarakat pada tahun berjalan	1	1	2.464.800,00	1	2.464.800,00	1	2.464.800,00	1	2.464.800,00	1	2.464.800,00	5	12.324.000,00	Kelurahan Bendogerit	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	1. Optimalisasi program RT KEREN menjadi KARYA MAS (Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan) dengan meningkatkan kemanfaatan bagi warga masyarakat 2. Penguatan peran kampung wisata dan membangun objek wisata baru 3. Normalisasi Drainase Perkotaan, Normalisasi Sungai untuk peningkatan fungsi irigasi dan Sanitasi Perkotaan	Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
2	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum	Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kecamatan Sananwetan dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kota Blitar, dalam mendukung misi Pemerintah Kota Blitar yang ke enam yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sananwetan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN							KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	AKHIR PERIODE RENSTRA	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 9 variabel yaitu Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/ tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana sesuai PermenPAN RB no 14 tahun 2017 yang dihitung sesuai aplikasi e-sukma Provinsi Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan hasil e-sukma	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	Baik (88,14)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90,25)	Sangat Baik (90,50)	Sangat Baik (90,75)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (91)	
2	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di Kecamatan	Status kinerja kecamatan adalah hasil evaluasi atas instrumen penilaian sinergitas kinerja kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan, Instrumen penilaian tersebut mencakup 10 indikator kinerja pelayanan publik tingkat kecamatan dan 7 indikator kinerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan PP no. 17 tahun 2018	Status kinerja kecamatan pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi provinsi	Status Kinerja Kecamatan	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN							KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	AKHIR PERIODE RENSTRA	
		evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan melalui isian formulir evaluasi diri yang ada didalam aplikasi epdeskel berdasarkan Permendagri no. 81 tahun 2015 evaluasi epdeskel terdiri dari 3 kategori yaitu kelurahan dengan tingkat perkembangan "kurang berkembang", "berkembang" dan "cepat berkembang" dengan kategori tertinggi adalah "cepat berkembang"	(Jumlah kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang" dibagi jumlah seluruh kelurahan) x 100%	Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang"	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NIHIL											

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel di mana seluruh bagian dan seksi berkewajiban melaksanakan serta menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Dengan disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar khususnya di Kecamatan Sananwetan sehingga mampu mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Kota Blitar yang maju, sehat, dan sejahtera menuju Kota masa depan

Kaidah Pelaksanaan :

1. Renstra Kecamatan Sananwetan merupakan pedoman dalam menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan.
2. Apabila terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Rencana Strategis maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Walikota.

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2029. Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

6. **Fleksibilitas dan Responsif terhadap Perubahan**
   Mengingat dinamika lingkungan strategis yang cepat (perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, maupun keadaan darurat/bencana), pelaksanaan Renstra PD harus memungkinkan adanya penyesuaian strategi secara adaptif.
7. **Partisipatif dan Inklusif**
   Pelaksanaan Renstra PD perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis, tetapi juga pedoman operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode lima tahun ke depan. Agar Renstra dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur, maka diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Penjabaran ke dalam Dokumen Perencanaan Tahunan**
   Renstra PD akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggaran dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
2. **Penyusunan Perjanjian Kinerja**
   Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKKc), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum dalam Renstra akan dijadikan dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, sehingga arah kinerja dapat lebih terukur dan terikat secara formal.
3. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)**
   Dibangun sistem monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menilai capaian program dan kegiatan sesuai indikator yang ditetapkan, sekaligus menjadi umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.
4. **Pelaporan Akuntabilitas Kinerja**
   Hasil pelaksanaan Renstra PD akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya, yang memuat capaian indikator, analisis pencapaian, serta rekomendasi perbaikan kinerja.
5. **Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan dan Kondisi Lingkungan Strategis**
   Apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, peraturan perundangan, maupun dinamika sosial-ekonomi, Renstra PD dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme *review* Renstra atau perubahan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008